

# PROSIDING PERTEMUAN KOORDINASI DAN BERBAGI PEMBELAJARAN PROGRAM ACCESS TAHAP II

PERTEMUAN KOORDINASI DAN BERBAGI PEMBELAJARAN  
PROGRAM ACCESS  
DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
Mataram 29-30 Juni 2010



**Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa  
Provinsi Nusa Tenggara Barat**



Australia Indonesia Partnership  
Kemitraan Australia Indonesia



**IDSS**

a world where aid is no longer needed

An aurecon company



# DAFTAR ISI

## Halaman

### Kata Pengantar

### Daftar Isi

### Kerangka Kegiatan

A. Latar Belakang .....	1
B. Tujuan .....	2
C. Alur Pertemuan .....	3
D. Peserta Pertemuan .....	4
E. Pelaksana Pertemuan .....	4
F. Waktu dan Tempat .....	5
G. Moderator/Fasilitator .....	5

### Proses dan Hasil

I. Pembukaan .....	6
II. Orientasi dan Penjelasan Alur .....	7
III. Proses Acara .....	8
1. Panel Diskusi .....	8
2. Pembelajaran praktek-praktek dilapangan perencanaan partisipatif inclusive miskin dan perempuan (hasil dan dampaknya) .....	25
3. Meningkatkan alokasi anggaran Pemda untuk pembangunan melalui proses perencanaan yang partisipatif, inclusive miskin dan perempuan ....	31
4. Diskusi Kelompok I (Review pembelajaran Hari I) .....	36
5. Belajar dari Jeneponto “Strategi membangun dan mewujudkan komitmen para pihak dan Peragaan hasil peta social” .....	37
6. Diskusi Kelompok Tahap II .....	38
7. Membangun Komitmen .....	38
8. Evaluasi .....	39
9. Penutupan .....	40
10. Galeri Foto .....	41

# KATA PENGANTAR

**T**ata Kepemerintahan Lokal Demokratis adalah agenda besar yang menjadi perhatian program ACCESS Tahap II dengan tujuan memastikan terwujudnya warga dan organisasi warga berdaya dalam melakukan interaksi dinamis dengan pemerintah dan stakeholder lainnya untuk meningkatkan hasil-hasil pembangunan. Tujuan ini menjadi *core statement* ACCESS dalam melaksanakan programnya bersama mitra. ACCESS sudah memasuki tahun ke-7 berkiprah mendukung pembangunan di Propinsi Nusa Tenggara Barat khususnya di Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Barat. ACCESS tahap I (2003-2007) memfokuskan pada penguatan kapasitas organisasi masyarakat sipil dan kelompok warga dalam rangka pengentasan kemiskinan melalui tiga intervensi utama yaitu: Perencanaan yang inklusif orang miskin dan perempuan, pengembangan ekonomi lokal dan penguatan kelembagaan OMS dan jaringan kerja OMS. Pada ACCESS Tahap II (2008-2013). Ada empat tema utama yang menjadi *entry point* untuk mendukung terwujudnya TKLD di masing-masing kabupaten dampingan ACCESS yaitu: Perencanaan dan penganggaran partisipatif, pengembangan ekonomi lokal, pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan, dan peningkatan pelayanan publik. Dari sisi wilayah kerja ACCESS diperluas menjadi empat lokasi yaitu: Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima.

Dalam rangka memastikan tujuan di atas tercapai, maka ada tiga arah strategis yang menjadi strategi besar implementasi kegiatan-kegiatan yang dikerjasamakan di Program ACCESS yaitu: pemberdayaan, interaksi dinamis dan perluasan dampak. Strategi ini dijalankan dengan merujuk pada prinsip dan nilai-nilai partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan keadilan sosial. Gap dan bias yang masih menjadi tantangan di tingkat relasi pembangunan antar aktor, khususnya keterlibatan aktif orang miskin, perempuan, pemuda dan kelompok marjinal lainnya menjadi komitmen program ACCESS untuk menggunakan strategi gender dan sosial yang inklusif. ACCESS Tahap II mengupayakan untuk membangun sinergi antara pemerintah dan warga maupun komunitas dimana peran pemerintah lebih pada memfasilitasi komunitas dan mempromosikan lingkungan yang kondusif baik itu dari segi ruang dan kebijakan serta menyediakan sumberdaya agar masyarakat dan pemerintah bisa bekerjasama secara aktif dan konstruktif untuk mencapai cita-cita masing-masing.

Berbagi pengalaman dan pembelajaran merupakan implementasi dari tiga arah strategis di atas. Kami gembira bahwa *counterpart* kami di provinsi khususnya BAPPEDA dan BPMPD sangat terbuka dan responsif selama proses kerjasama ini berlangsung. Pada kesempatan pertama ini kami berterima kasih pada pemerintah provinsi NTB yang telah memberikan kesempatan pada program ACCESS Phase II untuk berbagai pengalaman dan pembelajaran khususnya terkait ***system perencanaan pembangunan yang partisipatif inclusive kelompok miskin dan perempuan serta kelompok marginal lainnya sebagai dasar mengembangkan kebijakan dan implementasi dalam perencanaan pembangunan desa***

Terima kasih

**TIM ACCESS NTB**

## PERTEMUAN KOORDINASI DAN BERBAGI PEMBELAJARAN PROGRAM ACCESS DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Mataram, 29-30 Juni 2010

Kerjasama ACCESS dengan BPMPD Provinsi NTB

---

### A. LATAR BELAKANG

Upaya untuk meningkatkan dampak pembangunan, dengan memperkenalkan paradigma pendekatan baru, telah banyak dilakukan oleh berbagai pihak agar manfaat pembangunan betul betul tepat sasaran, yakni pada mereka yang membutuhkan. Demikian pula ACCESS (*Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme*) telah memperkenalkan dan mendukung berbagai kegiatan yang diinisiasi dari local serta penerapan pendekatan didasarkan pada kekuatan yang dimiliki. Selain itu, kegiatan yang dilakukan juga menekankan pada upaya memberdayakan masyarakat terutama kelompok perempuan dan terpinggirkan agar mereka mampu terlibat dalam proses pengambilan keputusan secara aktif dalam menetapkan tujuan dan manfaat pembangunan desa. Dengan pemikiran bahwa, jika dibandingkan pihak luar, masyarakat setempat lebih paham bagaimana isu lokal berdampak pada mereka sendiri, maka partisipasi mereka menjadi sangat penting dalam kegiatan program.

Masyarakat seringkali kekurangan informasi tentang bagaimana cara yang sebaiknya dalam menghadapi masalah mereka. Kegiatan yang dikembangkan secara partisipatif akan memberikan kesempatan kepada kelompok masyarakat untuk melihat situasi dari berbagai sudut pandang dan membuat keputusan (*inform decision*) mengenai bagaimana mereka mengembangkan yang terbaik buat mereka sendiri. Selain itu, kegiatan pembangunan yang dilakukan masyarakat ini bukanlah suatu kegiatan yang hanya dilakukan dengan satu kali kegiatan saja, namun dilakukan dengan banyak kegiatan dan dilakukan review dan refleksi pada setiap waktu sebagai landasan melakukan tindakan selanjutnya. Hal tersebut merupakan bagian dari proses pemberdayaan, dimana sebagian atau seluruh bagian masyarakat sama-sama memiliki tanggung jawab dan komitmen untuk mendukung perjuangan menuju kehidupan yang lebih baik. Proses tersebut merupakan lingkaran yang tak terputus dan terus menerus.

Beberapa hasil proses kegiatan, misalnya perencanaan partisipatif dengan pendekatan CLAPP-GSI (*Community Learning and Participatory Process – Gender and Social Inclusive*) telah dapat mewujudkan tersusunnya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). RPJMDes kemudian dijabarkan kedalam Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDDes) tahunan yang disertai dengan tersusunnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Proses tersebut telah diintegrasikan kedalam system Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Pengalaman pelaksanaan kegiatan penerapan perencanaan partisipatif,

dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan khususnya di bidang pelayanan publik setidaknya selalu diintegrasikan dengan pemerintah kabupaten sehingga pelaksanaannya sangat membantu penerapan kebijakan pemerintah baik tingkat kabupaten maupun tingkat pusat.

Mempertimbangkan pentingnya pengalaman ini dan mencoba menggali masukan dari pengalaman kegiatan lain yang relevan, maka ACCESS bekerjasama dengan Bappeda Propinsi Nusa Tenggara Barat menganggap penting menyelenggarakan Pertemuan Koordinasi dan Sharing Pembelajaran bagi Pemerintah Kabupaten dan Kota di Propinsi Nusa Tenggara Barat. Harapannya bahwa hasil-hasil tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembelajaran sekaligus review dalam pelaksanaan pembangunan di kabupaten/kota masing-masing.

## **B. TUJUAN PERTEMUAN**

Secara umum tujuan Pertemuan Koordinasi dan Sharing Pembelajaran ini adalah: ***“BAPPEDA dan BPMPD dari 9 kabupaten/kota se Nusa Tenggara Barat menggunakan berbagai pengalaman terkait system perencanaan pembangunan yang partisipatif inclusive kelompok miskin dan perempuan serta kelompok marginal lainnya sebagai dasar mengembangkan kebijakan dan implementasi dalam perencanaan pembangunan desa”***.

Sedang secara khusus, pertemuan diharapkan dapat mencapai beberapa tujuan, yakni:

1. Terjadinya sharing pembelajaran antar Pemerintah Kabupaten se NTB sebagai bagian upaya menyebarkan keberhasilan pembangunan daerah yang melibatkan stakeholder lainnya.
2. BAPPEDA dan BPMPD dari 9 kabupaten/kota se Nusa Tenggara Barat mempertimbangkan untuk menerapkan hasil pembelajaran yang diperoleh khususnya terkait perencanaan pembangunan partisipatif inclusive kelompok miskin, perempuan dan kelompok marginal lainnya.
3. BAPPEDA dan BPMPD dari 9 kabupaten/kota se Nusa Tenggara Barat menyusun rencana tindakan yang jelas dan operasional untuk mengkomunikasikan hasil pembelajaran yang diperoleh kepada berbagai SKPD dalam lingkup kabupaten/kota masing-masing.

## **C. ALUR PERTEMUAN**

1. Sharing pembelajaran pengembangan program perencanaan partisipatif terkait dengan kebijakan-kebijakan di tingkat propinsi.

2. Sharing pembelajaran pelaksanaan perencanaan partisipatif dan upaya mengintegrasikannya kedalam system musrenbang daerah.
3. Rumusan masukan untuk pengintegrasian kegiatan perencanaan partisipatif kedalam system musrenbang daerah.

Untuk itu maka proses pertemuan didesain sebagai berikut:

1. **Orientasi dan Pembukaan** – acara akan dibuka oleh wakil dari pemerintah propinsi, kemudian dilanjutkan dengan arahan tentang kebijakan yang relevan dengan kegiatan yang sedang berkembang (Permendagri 66 Tahun 2007) serta kebijakan-kebijakan lain yang relevan.
2. **Pameran produk dokumentasi** – berbagai pengalaman Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Bima dan Dompu yang telah dihasilkan akan didokumentasikan dalam bentuk visualisasi (foto, bagan, video, leaflet, booklet, dll) oleh setiap mitra. ACCESS akan mendukung dalam mengembangkan visualisasi tersebut. Pameran akan di observasi oleh seluruh peserta dalam rangkaian pembukaan. Hasil dokumentasi dan visualisasi tersebut akan diletakkan dalam ruangan pertemuan dengan beberapa partisi sehingga peserta dapat melakukan observasi setiap saat setelah pembukaan ketika pelaksanaan sesi telah atau akan dilakukan.
3. **Panel diskusi sesi sharing pembelajaran** – Tahap ini merupakan bagian dari sharing pembelajaran tentang hasil-hasil kegiatan kerjasama ACCESS dan Pemerintah Kabupaten, khususnya praktek-praktek sukses dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan partisipatif dengan pendekatan CLAPP-GSI. Proses ini dilakukan dengan meminta nara sumber tertentu untuk memulai memberi inspirasi dalam diskusi lebih lanjut. Sumber pengalaman adalah dari Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Barat dan daerah lain yang relevan. Pada sesi ini, narasumber juga diminta memberikan penekanan pada penerapan GSI hingga strategy pengintegrasian dalam konteks musrenbang. Tema tersebut akan dibahas secara khusus dalam workshop ini.
4. **Diskusi kelompok** – Bertujuan untuk membuka dan mengeksplorasi wawasan peserta tentang pengalaman baru terkait pembangunan partisipatif. Proses eksplorasi akan dilakukan dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok/meja diminta untuk mendiskusikan topik-topik tertentu tentang hasil pembelajaran yang diperoleh dalam workshop (beberapa meja mempunyai topic yang sama). Beberapa meja dengan topic yang sama kemudian bergabung untuk berbagi gagasan. Hasilnya kemudian diplenokan. Beberapa contoh pertanyaan (panduan diskusi), seperti: Apa yang dapat dipelajari sebagai manfaat utama dari pelaksanaan perencanaan partisipatif; bagaimana KPM/actor desa dapat lebih efektif dalam memfasilitasi pembangunan partisipatif; apa yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memperkuat keterkaitan antara perencanaan di desa – kecamatan – kabupaten hingga nasional.
5. **Menggalang komitmen dan action plan.** Pada sesi akhir dari pertemuan ini, peserta diminta untuk mengungkapkan komitmen mereka dalam sebuah kartu, seperti: apa yang

akan mereka lakukan segera di daerah atau lembaga mereka masing-masing terkait dengan hasil pertemuan.

6. **Penutup.** Workshop akan dievaluasi secara partisipatif oleh peserta, kemudian ditutup oleh Kepala BPMPD Propinsi Nusa Tenggara Barat.

#### **D. PESERTA PERTEMUAN**

Peserta pertemuan koordinasi dan sharing pembelajaran ini sebanyak 80 orang, terdiri dari utusan BAPPEDA dan BPMPD dari 9 Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat dan Pemda Propinsi sebanyak 38 orang, dari Proyek, lembaga donor LSM mitra ACCESS sebanyak 38 orang, Kepala Desa dan atau champion local yang sudah berhasil mengembangkan perencanaan terintegrasi masing-masing dari Lombok Barat, Lombok Tengah, Bima dan Dompu sebanyak 4 orang. Dalam penetapan peserta, organisasi pelaksana akan mempertimbangkan keseimbangan antara peserta laki-laki dan perempuan, sebagai upaya mendorong keterlibatan perempuan dalam kegiatan.

#### **E. PELAKSANA PERTEMUAN**

Pelaksanaan pertemuan ini merupakan kerjasama antara ACCESS Phase II dan BAPPEDA Propinsi Nusa Tenggara Barat dengan menunjuk Lembaga Pemberdayaan Pondok Pesantren dan Masyarakat (LP2M) - Mataram sebagai organisasi pelaksana teknis.

#### **F. WAKTU DAN TEMPAT**

Pertemuan ini dilaksanakan pada :

Hari & Tanggal : Selasa – Rabu, 29 – 30 Juni 2010.  
Tempat : Hotel Lombok Raya Mataram

#### **G. MODERATOR/FASILITATOR**

Selama proses pertemuan, dipandu oleh:

1. I Nyoman Oka, didukung
2. Toha Arifin
3. Nanik Munthohiyah,
4. Arief Mahmudi dan
5. I Gusti Bagus Aryawa.

## PERTEMUAN KOORDINASI DAN BERBAGI PEMBELAJARAN PROGRAM ACCESS DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Mataram, 29-30 Juni 2010

Kerjasama ACCESS dengan BPMPD Provinsi NTB

### I. PEMBUKAAN

Pembukaan acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama kemudian dilanjutkan dengan laporan panitia penyelenggara yang disampaikan oleh Drs. I Putu Wedadi dari BPMPD Propinsi NTB dan sambutan oleh Korprov ACCESS Phase II Provinsi NTB – Lombok



yaitu Ibu Dian Anggraeni serta dibuka secara resmi oleh Bapak Sudaryanto selaku Kepala BPMPD Provinsi NTB. Inti yang disampaikan bahwa acara tersebut merupakan bentuk komitmen dan kerjasama antara ACCESS phase II dengan Pemda NTB yang dalam hal ini adalah BPMD dan BAPPEDA NTB dalam kerangka sharing pembelajaran dan membuka ruang koordinasi dalam mengintegrasikan program-program yang menjadi kompetensi masing-masing.

Pada kesempatan itu Kepala BPMPD juga menyampaikan perihal tujuan acara Rapat Koordinasi antar SKPD yang dikombinasikan dengan proses sharing pembelajaran yang di gagas oleh ACCESS Phase II di NTB. Berikut adalah petikan mengenai sambutan kepala BPMPD Propinsi NTB yang disampaikan sebelum membuka acara.

Assalamu'alaikum Wr.Wb,

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa cita-cita pemerintah propinsi NTB khususnya BPMPD untuk mendorong terbangunnya pembangunan partisipatif yang berkeadilan untuk orang miskin, perempuan dan kelompok marjinal lainnya bisa didukung oleh berbagai mitra diantaranya Program ACCESS Phase II.

Pemerintah propinsi NTB secara konsisten sedang dan akan menjalankan proses pembangunan yang partisipatif. Wujud nyata komitmen tersebut bukan hanya membuka ruang untuk partisipasi masyarakat tetapi juga banyak turun ke masyarakat untuk melihat, mendengar dan menerima umpan balik tentang berbagai kebijakan dan isu yang berkembang di masyarakat.

Berangkat dari hal-hal di atas, Pemerintah Propinsi khususnya BPMD menggunakan pendekatan berbasis aset (kekuatan) dan berbasis apresiasi akan membangun pembelajaran dan

mendorong upaya-upaya optimalisasi berbagai program donor, pemerintah pusat maupun pemerintah propinsi sendiri agar bermanfaat bagi NTB secara luas. Melalui pembelajaran praktek-praktek baik ini diharapkan bisa menjawab kegagalan di masa lalu dan tantangan saat ini ke depan. Selain tentu saja memastikan ada upaya peningkatan kualitas dan kuantitas dari praktek-praktek baik itu sendiri. Melalui rapat

***“Rapat koordinasi hari ini sedikit berbeda warna, mudah-mudahan lebih baik dan istimewa serta banyak kita dapat petik pembelajarannya, karena kita akan banyak menimba ilmu, mendengarkan praktek-praktek keberhasilan, termasuk dari daerah lain, untuk itu coba kita pertimbangkan bagaimana permasalahan pemberdayaan masyarakat yang selama ini kita hadapi, akan bisa lebih baik, lebih efektif, lebih berkeadilan, lebih memperhatikan kelompok marginal, kaum perempuan, dan orang miskin, yang selama ini memang kita rasakan semua.” (Bpk. Sudaryanto, Kepala BPMD NTB)***

koordinasi tiga hari hari kami menggagas bersama ACCESS Phase II desain pertemuan yang berbeda yaitu pertemuan untuk berbagi informasi dan pembelajaran. Tujuan utama dari kami dengan desain baru ini agar mitra-mitra kami di Kabupaten dan Kota bisa mengenal dan lebih dekat praktek-praktek baik warga masyarakat NTB. Hal ini dilakukan dengan melihat apa yang telah dilakukan di wilayah kerja ACCESS sebagai entry point. Kami juga berkomitmen upaya ini bisa dilakukan berkelanjutan sebagai apresiasi dan pembelajaran untuk mendukung NTB Beriman dan Bersaing .

Semoga niatan baik ini menjadi komitmen dan mendapat dukungan dari berbagai pemangku kepentingan di NTB.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

H. Sodaryanto, MA – Kepala BPMD Propinsi NTB

## II. ORIENTASI DAN PENJELASAN ALUR ACARA

Orientasi dan penjelasan alur proses ini difasilitasi oleh bapak I Nyoma Oka dengan menjelaskan enam point kegiatan yang akan berlangsung selama 2 hari. Ke enam point kegiatan tersebut adalah :

**Pertama** : Dimulai dengan Panel diskusi yang menghadirkan 4 narasumber yakni , BPMPD Provinsi NTB, Bappeda Provinsi NTB, Pemda Kabupaten Lombok Tengah dan Pemda Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan. Tema diskusi adalah *“Dukungan regulasi pemerintah dalam pengintegrasian perencanaan partisipatif warga inclusive kemiskinan dan perempuan melalui skema Musrenbang”*. Diskusi tersebut dipandu oleh Bapak Toha Arifin (Korprov ACCESS NTB – Sumbawa).



**Kedua** : Berbagi pengalaman 4 champion lokal dari Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Tengah. Sesi tersebut akan berbagi pengalaman tentang apa yang terjadi di lapangan, bagaimana diterapkan regulasi tersebut, apa dampaknya dan selanjutnya apa hasilnya. Proses tersebut dipandu oleh Ibu Nanik Munthohiyah (PO ACCESS NTB - Lombok) dan Bapak Arief Mahmudi (PO ACCESS NTB - Sumbawa) dengan metode talkshow.

**Ketiga**: Berbagi pengalaman Kerjasama antara Pemda dengan OMS dan Masyarakat dari Kabupaten Sumba Timur – NTT. Temanya adalah *“melalui Perencanaan dengan pendekatan Inkusif Orang miskin dan perempuan secara partisipatif pada penyusunan RPJMDes, dapat meningkatkan alokasi anggaran untuk pembangunan desa”*. Proses tersebut dipandu oleh Bapak I Gusti Bagus Aryawa (dari Mitra Samya Mataram).

**Keempat** : Praktek-Praktek Pembelajaran dan Komitmen yang dapat diwujudkan. Komitmen tidak hanya dikatakan, namun juga dapat diwujudkan dengan pengalaman dari Kabupaten Jeneponto – Sulawesi Selatan dengan tema *“Membangun komitmen dengan berbagai pihak dari Desa, Kepala Desa, sampai ke Bupati , sehingga menjadi gerakan didalam menyusun perencanaan masyarakat yang berbasis fokus kemiskinan dan keadilan gender”*.

**Kelima** : Membahas pembelajaran yang didapat selama lokakarya berlangsung, yang berasal dari sumber-sumber yang sudah berpengalaman, dilanjutkan dengan diskusi kelompok.

**Keenam** : Kesimpulan, Evaluasi dan Penutupan

Hal yang menarik dari proses ini adalah bahwa alur dan agenda pertemuan secara aklamasi disepakati bersama oleh seluruh peserta yang hadir.

### III. PROSES JALANNYA KEGIATAN

#### 1. Panel diskusi



Pada sesi kegiatan panel diskusi ini, mengangkat tema *“Dukungan regulasi pemerintah dalam pengintegrasian perencanaan partisipatif warga inclusive kemiskinan dan perempuan melalui skema musrenbang”*. Kegiatan panel diskusi ini di pandu oleh Bapak Toha Arifin – (Koordinator Provinsi untuk program ACCESS Phase II NTB – Sumbawa) sebagai moderator yang manghadirkan 4 orang narasumber yang masing-masing menyampaikan sharing pembelajarannya sebagai berikut:

- 1) **Bapak Sudaryanto**, kepala BPMPD Provinsi NTB mempresentasikan pengalamannya dengan judul *“Penanganan masalah kemiskinan melalui gerakan 3A (ABSANO, ADONO dan AKINO) bersama dengan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri pedesaan”*.
- 2) **Bapak Lalu M. Amin**, Assisten II Pemda Kabupaten Lombok Tengah menyampaikan presentasinya yang berjudul *“Dukungan regulasi pemerintah dalam mengintegrasikan perencanaan partisipatif, inclusive kelompok miskin dan perempuan melalui skema musrenbang”* sebuah pengalaman berharga bagi Pemda Kabupaten Lombok Tengah.
- 3) **Bapak Suleman Natsir**, Bappeda Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan menyampaikan pengalaman pembangunannya yang berjudul *“Integrasi perencanaan partisipatif dalam skema musrenbang di Kabupaten Jeneponto Propinsi Sulawesi Selatan”*.
- 4) **Bapak M. Wahyudi**, Bappeda Provinsi NTB yang menyajikan presentasinya dengan judul *“Dukungan regulasi pemerintah propinsi NTB dalam pengintegrasian perencanaan partisipatif warga inclusive kemiskinan dan perempuan melalui musrenbang”*.



Berikut adalah uraian singkat mengenai presentasi dari ke empat narasumber tersebut:

## 1. Presentasi dari Bpk Sudaryanto - Kepala BPMPD Provinsi NTB

Judul Makalah :

### ***PENANGANAN MASALAH KEMISKINAN MELALUI GERAKAN 3A (ABSANO, ADONO, AKINO) DAN KEGIATAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERDESAAN***

Luas Wilayah Nusa Tenggara Barat 20.153,15 km<sup>2</sup> yang secara administratif meliputi 10 kabupaten/ kota, 116 kecamatan, 819 desa, dan 136 kelurahan. Tantangan yang paling besar saat ini di Provinsi NTB adalah kemiskinan, dan sebagian besar kemiskinan yang terjadi adalah di level perkotaan. Fakta kemiskinan ini bisa dilihat dan diukur melalui analisis data berdasarkan kriteria berikut ini :



#### **14 kriteria miskin dari BPS yang terdiri dari:**

1. Luas lantai < 8m<sup>2</sup>/orang
2. Lantai tanah/bambu/kayu murah
3. Dinding bambu/rumbai/kayu kualitas rendah/tembok tanpa plester
4. Tidak memiliki fasilitas bab
5. Tidak menggunakan listrik
6. Menggunakan sumur/sumber air tidak terlindung
7. Memasak pakai kayu, arang, minyak tanah
8. Konsumsi daging/susu/ayam 1 x seminggu
9. Satu stel pakaian baru setahun
10. Makan 1 atau 2 kali sehari
11. Tidak bisa berobat ke puskesmas
12. Pendapatan < 600 ribu rupiah per bulan per kk
13. Kepala rumah tangga tidak tamat SD
14. Tidak ada barang yang mudah dijual seharga Rp 500.000,-

### **Jenjang kemiskinan**

1. Jika memenuhi < 8 Kriteria = Hampir miskin.
2. Jika memenuhi 8 s/d 11 Kriteria = Miskin
3. Jika memenuhi 12 s/d 14 Kreteria = Sangat Miskin

**Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2006 – 2008  
Di Provinsi Nusa Tenggara Barat**

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk		
	2006	2007	2008
(1)	(2)	(3)	(4)
(1) Lombok Barat	782.943	796.107	816.523
(2) Lombok Tengah	825.772	831.286	844.105
(3) Lombok Timur	1.053.347	1.056.312	1.068.486
(4) Sumbawa	403.500	406.888	413.869
(5) Dompu	206.414	208.867	213.185
(6) Bima	410.275	412.504	416.446
(7) Sumbawa Barat	95.837	97.013	99.156
(8) Kota Mataram	353.183	356.141	362.243
(9) Kota Bima	126.035	127.373	129.843
<b>NTB</b>	<b>4.257.306</b>	<b>4.292.491</b>	<b>4.363.756</b>

**TINGKAT KEMISKINAN DI NTB TAHUN 2009**

- Jumlah Penduduk Miskin di NTB Maret 2009 mencapai 1.050.948 orang (22,78 %) mengalami penurunan (Maret 2008) 1.080.613 (23,81 %)
- 2009 penduduk miskin perkotaan (557.539 jiwa / 28,84 %) lebih tinggi dari pedesaan (493.409 jiwa / 18,40 %)
- Garis kemiskinan 2009 → Rp.185.025,00 mengalami kenaikan dibanding 2008 → Rp. 167.536,00
- Garis Kemiskinan Makanan (GKM) lebih besar dibanding Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). Maret 2009 GKM Rp. 141.333,00 dan GKBM Rp. 43.692,00
- Maret 2009 Garis Kemiskinan Perkotaan Rp. 213.450,00 lebih tinggi dibanding Perdesaan Rp. 164.526,00
- Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) 2009 mencapai 5,15 mengalami kenaikan dibanding 2008 mencapai 4,49
- Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) 2009 mencapai 1,68 mengalami kenaikan dibanding 2008 mencapai 1,28.

Dalam RPJMD targetnya adalah terjadi penurunan persentase penduduk miskin dari **24% menjadi 14% pada tahun 2013.**

# Janji Pemerintah dalam RPJM 2005-2009

- Target pertumbuhan ekonomi rata-rata dalam kurun waktu 2004-2009 adalah 6,6%.
  - Faktanya: Dalam kurun 2004-2008 hanya 5,9%
- Target angka pengangguran turun dari 9,9 pada tahun 2004 menjadi 5,1 pada tahun 2009.
  - Faktanya: pada tahun 2008 baru mencapai angka 8,4%.
- Jumlah penduduk miskin ditargetkan turun dari 16,6% pada tahun 2004 menjadi 8,2% pada tahun 2009.
  - Faktanya: Pada tahun 2008 jumlah penduduk miskin adalah 15,4%

Roundtable Discussion Penanggulangan Kemiskinan 2010

11

## Untuk menanggulangi kemiskinan, ada 3 Kluster/kelompok intervensi :

- Kluster 1 : Dalam bentuk “bantuan”, contoh : Jaminan sosial yang langsung (BLT)
- Kluster 2 : Dalam bentuk “Pemberdayaan”, contoh : PNPM, P2SPP, ACCESS
- Kluster 3 : Dalam bentuk “Pengembangan Ekonomi Produktif”, contoh : KUR, UKM, Lembaga Keuangan Mikro,dll.

Dengan alat ini diperkirakan akan tercapai penurunan angka kemiskinan.

## By name by address mungkinkah ?

Beberapa tahapan untuk mewujudkan data kemiskinan yang jelas sehingga target sasaran dapat terwujud telah diambil tindakan-tindakan pentahapan sebagai berikut :

- Sosialisasikan daftar nama keluarga miskin pada tingkat masyarakat.
- Verifikasi dengan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengoreksi daftar nama tersebut, jadi di BPS itu ada nama dan alamatnya, saya sudah memberikan masing-masing, kalau mau akses di BPS kabupaten juga ada. Silahkan kalau bisa by name by address itu sampai ke desa dan desa bisa memverifikasi, syukur kalau bisa seperti di Kabupaten Jeneponto sudah ada DUK, kalau dipegawai Daftar Urut Kepangkatan, mungkin kalau di desa *Daftar Urut Kemiskinan*, dari yang sangat miskin, kemudian miskin, dan hampir

miskin. Itu akan bagus sekali jika desa bisa memferifikasi dan menemukan nama-nama orang miskin, dan dapat diferifikasikan dan dikoreksi oleh masyarakat setempat sendiri.

- Tetapkan melalui musyawarah daftar nama keluarga miskin hasil ferifikasi.
- Targetkan nama yang direncanakan untuk dientaskan dari kemiskinan secara bertahap tiap tahun.
- Monitor perkembangannya bersama masyarkat
- Musyarawahkan perubahan daftar keluarga miskin.

*Petikan terakhir presentasi Kepala BPMPD NTB : “Penanganan kemiskinan di Provinsi NTB terus akan dilakukan dengan berbagai cara, termasuk pada rapat pembelajaran ini saya berani merubah rapat koordinasi yang biasanya tidak berbeda, sekarang kita bedakan dengan cara pembelajaran seperti ini, mudah-mudahan nanti punya ide, inisiatif dari SKPD atau dari pihak lain, data orang miskin bisa diverifikasi, buat daftar urut kemiskinan, dan seterusnya, dan kalau ada sebuah intervensi dari inspektorat akan tertuju pada data-data itu”.*

## 2. Bapak Lalu M Amin (Assisten II Pemda Kabupaten Lombok Tengah)

Judul Makalah :

**PENGALAMAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH :**

**DUKUNGAN REGULASI PEMERINTAH DALAM PENGINTEGRASIAN PERENCANAAN PARTISIPATIF INCLUSIVE KELOMPOK MISKIN DAN PEREMPUAN MELALUI SKEMA MUSRENBANG**



Latar Belakang kuatnya dukungan dari Pemda Kabupaten Lombok Tengah, antara lain didasarkan adanya fakta bahwa :

1. Hasil evaluasi kinerja pemda kabupaten Lombok Tengah bidang pelayanan publik tahun 2001 – 2004 menunjukkan (1) rapor yang kurang baik pada pelayanan publik dan tingkat kesejahteraan warga ( IPM, Indeks Kemiskinan, akses informasi), (2) efektivitas dan efisiensi

pengelolaan sumberdaya daerah rendah, (3) ruang partisipasi warga dalam pembangunan masih tersumbat.

2. Derasnya dampak perubahan sistem politik nasional
3. Kuatnya tuntutan adanya pertanggung gugatan social.

4. Adanya tuntutan perlunya desentralisasi pengetahuan, informasi dan keadilan bagi perempuan dan orang miskin
5. Rentannya pola hubungan kemitraan berbagai organisasi lembaga pemerintah dan swasta, terkait penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan

**Dalam rangka mendorong upaya itu maka perlu ada LANGKAH STRATEGIS.** Beberapa langkah strategis yang telah di ambil oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah antara lain:

1. Aksi penyadaran publik mengenai pentingnya menerapkan nilai-nilai partisipasi.
2. Keadilan, partisipatif, transparansi, akuntable dan mengintegrasikan dalam paket regulasi 10 hak dasar (Berupa: Perda, Perbup dan SE Bupati )
3. Memastikan kebijakan 10 hak dasar warga menjadi komitmen SKPD, OMS, masyarakat dan dunia usaha (CSR) termuat dalam RPJMD 2005-2010 (evaluasi 2006)
4. Membentuk wadah bersama 23 OMS, KSM untuk mengawal keberlanjutan penanggulangan kemiskinan
5. Pelembagaan forum belajar perubahan, dan mengelola perubahan (Misalnya Forum Lintas Aktor (FLA), Konsorsium, dll)
6. Penguatan kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)

Ada 3 Fokus utama yang diambil oleh Pemda Kabupaten Lombok Tengah mengenai pengintegrasian, yaitu pengintegrasian dalam :

- 1. TATANAN NILAI : NGO/OMS, KEADILAN, DEMOKRASI dan PLURALISME**
- 2. TATANAN KUALITAS INVESTASI DAN IPTEK (SWASTA )**
- 3. TATANAN FISIK (PEMERINTAH ) dan PENERAPAN 10 HAK DASAR**

Dalam penanganan kemiskinan di Kabupaten Lombok Tengah, Pemda berupaya untuk mewujudkan melalui proses penyusunan RPJMDesa sampai mengembangkan forum koordinasi. Intinya bahwa semua pihak yang berkepentingan dalam proses pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah bersedia duduk bersama dan berbicara serta bekerja sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Forum koordinasi bersama tersebut di Kabupaten Lombok Tengah disebut "**Konsorsium Lombok Tengah**". Tujuan dibentuknya konsorsium tersebut adalah untuk mengawal apa yang sudah disemangati bersama untuk semua pihak (actor pembangunan) dapat duduk bersama dalam mendialogkan isu-isu pembangunan daerah secara terkoordinatif.

Kemudian Pemda Kabupaten Lombok Tengah menyusun konsep kerja penanggulangan kemiskinan yang dituangkan dalam dokumen pendukung SDPK (Strategi Daerah Penanggulangan Kemiskinan). Inti dari dokument ini adalah pelimpahan dan penyerahan kewenangan dari Kabupaten kepada Kelurahan/Desa dalam Pelayanan Hak Dasar. Proses ini tentunya tidak mudah, padahal paket regulasi sudah ada.

Kenapa RPJMDes di Kabupten Lombok Tengah ditempatkan posisinya paling tinggi ? karena dalam menyusun RPJMDes dari 124 Desa dan Kelurahan sampai tahun 2009, kalau di ibaratkan

penyusunan dan pemanfaatan dokument RPJMDes dibuat dari proses A sampai Z, yang sudah mencapai di Z hanya 1 atau 2 desa. Namun demikian paket regulasi yang dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten Lombok Tengah untuk mencoba mengintegrasikan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk untuk program PNPM mandiri sehingga menjadi satu bahasa, yaitu **“satu perencanaan di satu desa”**. Berikut adalah posisi skema mengenai pemanfaatan dokument RPJMDes sehingga dapat dioptimalkan penggunaannya di Kabupaten Lobok Tengah.



Lalu apakah ada dampak dari upaya yang sudah dilakukan oleh Pemda Loteng ? Berikut adalah beberapa dampak yang cukup luar biasa diantaranya :

- Lombok tengah mampu menurunkan kemiskinan, ini versi dari BPS yakni tahun 2005 : 26,52% penduduk miskin, tahun 2006, naik menjadi 27,98% karena ada krisis waktu itu, tapi secara konsisten turun 2%, yakni di tahun 2007 menjadi 25,74, dan di tahun 2008 menjadi 22,32.
- Angka kematian Bayi drastis penurunannya. Kalau di tahun 2006, akses perempuan terhadap pekerjaan 64,40%, tahun 2008 naik jadi 85,49%.

Sehubungan dengan capaian sebagaimana di atas, diakui tidak sedikit tantangan dalam menjalankan aturan yaitu *pertama* berkaitan dengan informasi, khususnya musrenbang ditingkat desa, kecamatan, maupun kabupaten. *Kedua*, terkait dengan komitmen pejabat.

Hal yang terkait dengan komitmen pejabat, Bupati Kabupaten Lombok Tengah secara tegas menyampaikan bahwa setiap musrenbang harus dihadiri oleh unsur SKPD. Dari ketegasan ini ternyata dampaknya cukup besar sehingga banyak SKPD yang sekarang mendukung beberapa hasil Musrenbang, meskipun masih belum optimal. Karena dulunya kalau diambil perencanaan di tingkat Desa, maka penganggaran di SKPD banyak yang tidak sesuai (synchron).

*Komentar Bupati Lombok Tengah Bapak L.Wiratmaja terkait dengan komitmen pejabat :  
"Setiap musrenbang itu harus diabsen siapa yang datang, bukan tandatangannya yang dilihat, tapi sejauh mana SKPD yang bersangkutan, memastikan proses perencanaan dan penganggaran sampai pada masyarakat".*

Kemudian metode konvensi, sesuai dengan permendagri No. 15 maupun yang kemudian disempurnakan dalam Permendagri No 13 tahun 2006 sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip pembangunan yang tertuang dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan. Kalau di permendagri No 13 dan No. 59 program kegiatan ditentukan dari atas, dan ini kurang dapat difahami dalam logika berpikir misalnya apakah sama masyarakat yang tinggal di gunung, di pesisir pantai, dan di dataran dalam menentukan kebutuhan pembangunannya, padahal dari segi budaya dan kehidupannya pun sangat ber tolak belakang. Namun demikian, hal ini dapat disikapi oleh Pemda Kabupaten Lombok Tengah dengan menterjemahkan apa yang dikehendaki oleh masyarakat yang kemudian oleh masing-masing SKPD di terjemahkan melalui RKA-nya masing-masing. Sebagai Contoh, jika kebutuhan masyarakat bagaimana membuat produksi bata merah dan di RKA berbicara mengenai pemasaran, maka Pemda mencoba untuk membantu mengkaitkan sehingga menjadi dukungan di bidang pemasaran untuk bata merah. Dengan demikian sinkronisasi kebutuhan dari masyarakat dan kebijakan pembangunan dari atas dapat terjadi paling tidak mendekati sasaran. Upaya ini sederhana, tapi dampaknya luarbiasa, karena akan muncul usaha dari semuanya.

Diakui bahwa dalam perencanaan dan penganggaran, masih terjadi proses dualisme pada proses yang melibatkan masyarakat, dimana proses penganggaran merupakan kewenangan pemerintah. Istilahnya sering kali dikenal dengan pemaknaan perencanaan penganggaran yang teknokratif, partisipatif, dan topdown. Tapi mungkin kedepan, tergantung dari kondisi faktor daerah.

### **Harapan kedepan :**

- I. Fasilitator desa harus handal, di Kabupaten Lombok Tengah ada 10 KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa) disetiap desa, belum Handal. Mudah-mudahan ditahun ini 2011 fasilitator desa sudah handal sehingga sudah tidak ada masalah.

- II. Fasilitator pendukung yang efektif, perlu penerjemahan bersama, tanpa upaya ini agak ada hambatan untuk bisa berbuat, karena paket regulasi kita berubah setiap saat, setiap waktu, belum diterapkan sudah berubah. Apalagi disosialisasikan. Contohnya Kepres 13 tahun 2009, diubah menjadi Kepres 15 tahun 2010. Belum keluar petunjuk teknis pelaksanaannya sudah diganti. Berarti di daerah harus siap-siap untuk cepat melakukan perubahan.
- III. Fasilitator pendamping yang dinamis, kita punya banyak pasukan pendamping dari luar dan dari SKPD. Dan bagaimana melipatgandakan fasilitator-fasilitator pendamping ini sehingga di tubuh pemerintahan sendiri dapat berkembang sesuai dengan arah perubahan tersebut.
- IV. Tim metodologi yang kreatif, kita berharap jangan metodologi tahun lalu dijadikan keramat dan katanya tidak bisa diubah-ubah, padahal sekarang sudah banyak sekali perubahan.
- V. Administrasi dan logistik yang transparan. Siapa yang merencanakan dan siapa yang menjalankan siapa yang menginformasikan. Bagaimana semangat *"by name by address"* itu dapat dikirim ke desa menggunakan AKP dan menjadi angka yang disepakati bersama.

### 3. Bapak Sulaeman Natsir (BAPPEDA Kabupaten Jeneponto – Sulawesi Selatan)

Judul Makalah :

#### INTEGRASI PERENCANAAN PARTISIPATIF DALAM SKEMA MUSRENBANG DI KABUPATEN JENEPONTO SULAWESI SELATAN



Untuk periode 2008-2013, ini adalah periode ke 2 dari Bupati Jeneponto, sehingga dalam konteks pembangunan daerah merupakan program lanjutan dari pembangunan sebelumnya. Visi RPJMDaerah sebagai program keberlanjutan dari periode sebelumnya adalah terwujudnya masyarakat Jeneponto yang sejahtera dan bermartabat. Hal ini mengandung makna kuantitatif, sehingga Kabupaten Jeneponto menjadi lebih baik yaitu mencapai peringkat 11 dari 23 Kabupaten / Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

Ada 4 agenda utama dalam pembangunan Kabupaten Jeneponto yaitu:

1. Memperkuat kelembagaan pemerintah dan masyarakat
2. Mengembangkan kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat;
3. Meningkatkan sarana dan prasarana wilayah secara merata; dan

#### 4. Memperkuat dan memberdayakan ekonomi kerakyatan

Kesemuanya agenda pembangunan ini di Kabupaten Jeneponto dikerjakan dengan model-model kemitraan yaitu, bagaimana memperkuat kelembagaan masyarakat, bagaimana meningkatkan kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat, kemudian diperdalam dalam bentuk arah kebijakan khususnya pada bagaimana penguatan kelembagaan masyarakat. Lebih khusus lagi pada bagaimana mengintegrasikan RPJMDesa sebagai dokumen perencanaan partisipatif di tingkat desa kedalam skema Musrenbang. Sesungguhnya RPJMDesa itu di Kabupaten Jeneponto dimaknai sebagai produk Musrenbang.

#### **Apa yang mendasari kenapa Musrenbang ini sangat penting?**

Ditingkat daerah, seperti adanya UU 25 tahun 2004, UU 32 tahun 2004, PP 72 tahun 2005 tentang desa, Permendagri 37 tahun 2007 tentang Pengolahan keuangan

desa, yang kesemuanya mempersyaratkan penting adanya RPJMDesa. Dari produk ini kemudian ditingkat Kabupaten Jeneponto, diterjemahkan lebih spesifik lagi, dan juga sebenarnya pelaksanaan musrenbang itu telah diatur, bahwa salah satu dokumen rujukan utama adalah RPJM Desa. Operasionalnya setiap tahun, diterbitkan surat Edaran Bupati yang mengatur tentang Tata Cara Penyelenggara Musrenbang di Desa dengan salah satu persyaratannya adalah RPJM Desa sebagai dokumen rujukan.

Maksud dan tujuan dari peraturan yang ada pada permendagri 66 tahun 2007 sangat jelas, bahwa apa pentingnya perencanaan desa yang partisipatif itu, apa pentingnya keberadaan RPJM desa ditingkat desa, adalah kesemuanya dalam rangka bagaimana menjamin keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan ditingkat desa, bagaimana menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab di tingkat masyarakat. Kalau produk perencanaan desa tidak dilanjutkan oleh desa itu maka tidak akan ada rasa memiliki. Kemudian siapa yang melakukan perencanaan desa ini, untuk ditingkat desa?, tentunya Kepala desa bertanggungjawab sebagai pembinaan dan pengendalian dalam penyusunan RPJM desa dan RKP desa, untuk legalitasnya maka RPJM desa tidak bisa hanya disusun oleh satu, dua atau tiga orang KPM yang kemudian disahkan sebagai RPJMDes, tapi harus disusun bersama oleh masyarakat dalam satu forum, yang disebut musrenbang desa, yakni melalui diskusi terfokus, sharing pengalaman yang mengakomodir suara dan kepentingan kelompok miskin, perempuan dan kelompok marginal lainnya.

Pada kesempatan ini, berikut adalah pentahapan dari proses penyusunan RPJMDes di Kabupaten Jeneponto:

#### **Dasar Pelaksanaan**

- ***UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional***
- ***UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah***
- ***PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa***
- ***Permendagri No. 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa***

### **Tahapan penyusunan RPJM desa :**

#### **1. Persiapan**

Pembentukan Tim, terdiri dari Kades, Sekdes, Lembaga Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa, Tomas, Toga, Toda, PKK, KPM

#### **2. Pelaksanaan**

Mengacu pada RPJM Desa dengan memilih prioritas kegiatan setiap tahun anggaran yang disepakati oleh seluruh unsur masyarakat, berupa:

- a. Pemingkatan usulan kegiatan
- b. Indikasi Pembangunan desa dari RPJM Desa
- c. RKP Desa sebagai bahan APB Desa
- d. Berita Acara Musrenbang Desa

#### **3. Pemasarakatan**

Dilakukan pada berbagai kegiatan organisasi dan kelompok masyarakat yang ditetapkan pada Keputusan Kepala Desa melalui Pleno di tingkat desa.

Bagan alur Musrenbang desa/kelurahan yang dilaksanakan setiap tahun, tentu diawali dari rembuk dusun, untuk memperkaya usulan-usulan di tingkat dusun, pada saat musrenbang desa, salah satu dokumen rujukan utamanya adalah RPJMDesa, ada peta potensi, peta sosial dan sumberdaya desa. Dari beberapa kegiatan-kegiatan tersebut, dilahirkan kegiatan-kegiatan mana yang akan diajukan ke tingkat yang lebih tinggi, misalnya ke Kecamatan/Kabupaten untuk dilaksanakan oleh SKPD, kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh desa sendiri berdasar sumber daya yang ada misalnya melalui PAD desa atau Alokasi Dana desa, Swadaya warga desa dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh donor atau program-program lain yang ada di desa.

### **BENTUK KEMITRAAN DALAM PENYUSUNAN RPJMDesa/RKPDesa**

- **Penyusunan Dokumen RPJMDesa/RKPDesa, Bappeda melakukan Kemitraan dengan LSM dan Pemerintah Desa, antara lain:**
  - **Pemilihan dan Pelatihan KPM sebagai Fasilitator Desa**
  - **Penyiapan Tim Metodologi dan Fasilitator Pendukung**
  - **Pendampingan Penyusunan Dokumen RPJMDes/RKPDes**
  - **Fasilitasi Musrenbang Desa**
  - **Pelatihan Penyusunan Perdes RPJMDes dan APBDes**
- **Dalam rangka Penguatan Aparat Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa, BPMPD melakukan Pelatihan bagi Kades dan Sekdes untuk Penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa**

## **HASIL-HASIL YANG TELAH DICAPAI di Kabupten Jeneponto**

### **HASIL KUALITATIF**

1. Konsolidasi di tingkat OMS (Organisasi Masyarakat Sipil)
2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat (al. pendapatan petani rumput laut meningkat)
3. Peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga (masyarakat mampu melakukan pemetaan potensi dan perencanaan secara mandiri)
4. Peningkatan kesadaran kritis masyarakat, pengorganisasian masyarakat dan pemanfaatan sumber daya yang proporsional (terbentuk lembaga-lembaga advokasi masyarakat sipil)
5. Tingginya rasa memiliki masyarakat terhadap hasil program, karena terlibat sebagai pelaku utama dalam setiap tahapan kegiatan (terbentuk kelompok pemanfaat dan pemelihara)
6. Internalisasi nilai-nilai yang dipraktikkan dalam program *ACCESS* dalam program pemerintah daerah (penekanan nilai partisipatif dalam kegiatan pemerintah daerah)

### **HASIL KUANTITATIF**

1. Mitra Kerja : 10 LSM (7 Lembaga Lokal = Mitra Turatea, GP3A Turbin, Permata Dan Jarpuk Jeneponto, AMST, LC, AKUEP; 3 Lembaga Luar = Lipkem, LPPSEM, LPPSE)
2. Lokasi Desa Implementasi : 113 desa/kel untuk Pemetaan Sosial dan Sumber Daya Desa, serta 49 Desa untuk Perencanaan Desa (RPJM Desa dan RKPDesa)
3. Fokus Kegiatan : Pertanian, Usaha Produktif (Budi Daya Rumput Laut, Usaha Gula Merah), Air Bersih dan Air Irigasi, RPJM Desa dan RKP Desa)
4. Terdapat 349 orang KPM yang memiliki kapasitas sebagai Fasilitator Lokal yang terdiri dari unsur Masyarakat, LSM dan Pemerintah.

### **PERKEMBANGAN PENYUSUNAN RPJMDesa/RKPDesa**

**Mengingat Jumlah Desa yang cukup besar (82 desa), maka Fasilitas Penyusunan Dokumen RPJMDesa/RKPDesa dilakukan secara bertahap:**

- Tahun 2006-2007, sebanyak 2 desa, difasilitasi oleh Mitra Samya
- Tahun 2008, sebanyak 30 desa, berupa cost sharing Pemkab Jeneponto dengan ACCESS, difasilitasi oleh Mitra Turatea
- Tahun 2009, sebanyak 17 desa, berupa cost sharing Pemkab Jeneponto dengan ACCESS, difasilitasi oleh Mitra Turatea
- Tahun 2010, rencana 33 desa, diharapkan lanjutan cost sharing, sehingga seluruh desa di Kab. Jeneponto telah memiliki dokumen RPJMDes/RKPDes yang Partisipatif & Responsif Gender

Sekarang ini Jeneponto mendapatkan manfaat dari program-program yang luar biasa dari proses-proses yang partisipatif dengan melibatkan masyarakat secara partisipatif. Sehingga

kalau ada data yang akurat, hal itu dapat dijadikan rujukan program-program untuk sasaran implementasi, khususnya sasaran program kemiskinan, dan RPJMDesa sebagai barometernya.

#### 4. Bapak M.Wahyudi (BAPPEDA Provinsi NTB)

Judul Makalah :

### DUKUNGAN REGULASI PEMERINTAH DALAM PENGINTERASIAN PERENCANAAN PARTISIPATIF WARGA INCLUSIVE KEMISKINAN DAN PEREMPUAN MELALUI MUSRENBANG



Proses pengintegrasian perencanaan partisipatif warga secara inklusif kemiskinan dan melibatkan perempuan dalam perencanaan. Dasar regulasinya sudah jelas dan mekanismenya sudah ada. Jadi sesungguhnya dukungan pemerintah sudah jelas. Sekarang ini kalau dilihat dari tantangan yang ada, mengapa perencanaan harus berbasis masyarakat ? Terdapat beberapa alasan mengenai perencanaan harus berbasis masyarakat diantaranya adalah: *pertama* :

ketidak mampuan pemerintah yang disebabkan oleh pemerintah lebih focus pada fasilitas dari pada pelayanan, karakter masyarakat yang sudah terbiasa gratis dan kurang adanya dukungan politis. *Kedua* karena pengaruh decentralisasi / otonomi dimana peran pemerintah berubah dari penyedia menjadi fasilitator, koordinator dan pendukung.

Setiap lembaga negara itu selalu memiliki keterbatasan sumber daya, antara lain sumber-sumber ekonomi, sehingga kemampuan pemerintah mengartikulasi domain

ekonomi tersebut menjadi terbatas, oleh karena itu selama ini kita ternina bobokan oleh isu-isu bahwa masyarakat terbiasa gratis, sekarang kita melihat kebawah, setiap isu pemerintah daerah selalu membicarakan hal ini, padahal ini juga tergugat apakah misalnya untuk

#### Apa Itu Berbasis Masyarakat ?.....

- Berbasis masyarakat → masyarakat sebagai **pengambil keputusan** pada semua aspek penting dalam semua system perencanaan pembangunan dan **tanggungjawab** pengelolaan dan pemeliharaan pembangunan.
- Karakteristik
  - 1) Masyarakat **memutuskan** → pilihan teknologi, bentuk layanan, organisasi, ekaisme pendanaan, dan bentuk pengaturan.
  - 2) Masyarakat **bertanggungjawab** → pemeliharaan, pengaturan, mengatur orgaisasi pengelola, dan mendanai.

pendidikan gratis, apakah mulai dari semua aspek pendidikan digratiskan, atau hanya aspek tertentu, tetapi yang ditangkap masyarakat itu gratisnya.

Pemerintah tingkat provinsi pun juga memiliki keterbatasan tentang aturan-aturan bahwa sekarang ada UU otonomi daerah sehingga fungsi Provinsi sebagai fasilitasi atau koordinasi untuk mendukung sasaran yang ada di kabupaten maupun di desa.

Pemerintah selain sebagai fasilitasi juga bagaimana perencanaan itu dibangun berbasis di setiap desa, sehingga tanggungjawabnya jelas masing-masing level di tingkat pemerintahan. Mengapa berbasis masyarakat, karena teknologi, bentuk layanan yang dibutuhkan, semua mekanisme diatur oleh masyarakat. Ke depan proses pengambilan keputusan berbasis masyarakat itu harus dikembangkan sehingga bagaimana di level pemerintah bisa menangkap potensi yang ada di level desa kemudian mengartikulasi potensi itu untuk menyelesaikan masalah yang ada di level masyarakat, sehingga fungsi pemerintah sebagai fasilitator dan koordinasi itu dapat sinergis dengan pembangunan di level masyarakat.

*Pentingnya bagi kita bahwa semua itu harus berbasis masyarakat, karena yang akan kita layani ini adalah masyarakat, oleh karena itulah masyarakat yang diprioritaskan sebagai pengambil keputusan mana yang terpenting bagi*

## PERMASALAHAN AKTUAL :

### IPM NTB RENDAH

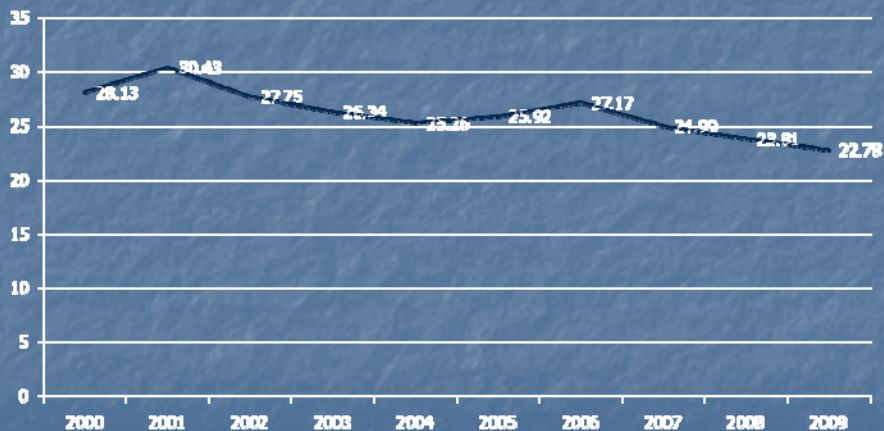
Laporan IPM atau *Human Development Indeks (HDI)* yang dikeluarkan UNDP dan BPS tahun 2006, menempatkan Provinsi NTB pada urutan ke-32 dari 33 Provinsi. IPM NTB 63,0 sementara rata-rata nasional 70,1. Provinsi tertinggi IPM-nya DKI Jakarta pada urutan pertama (76,3), Sulawesi Utara di urutan kedua (74,4), dan Riau di urutan ketiga (73,8). Provinsi IPM-nya terendah atau urutan ke-33 adalah Papua (62,8).

### BURUKNYA IPM NTB TAMPAK DARI :

- Dunia Pendidikan,
- Kesehatan, serta
- Pendapatan Perkapita Masyarakat.

Trend kemiskinan di Provinsi NTB turun dari 28,13 di tahun 2000 menjadi 22,78 di tahun 2009. Untuk NTB trendnya sangat perlahan. Kalau di Kabupaten Lombok Tengah tadi sangat signifikan turunnya, apakah kabupaten lain bisa mengikuti mekanisme itu, kalau bisa mengikuti seperti itu angka kemiskinan ini tidak sedatar sebagaimana ditunjukkan dalam gambar di bawah ini.

### Trend Persentase Penduduk Miskin Prov NTB



Ada beberapa faktor kemiskinan, yang perlu di fikirkan menjadi prooritas pembangunan dimaing-masing kabupaten kota di NTB. Faktor tesebut dapat di uraikan sbb:

#### **FAKTOR UTAMA KEMISKINAN**

1. Tingkat pendidikan yang masih rendah, mempengaruhi perilaku dan budaya masyarakat pedesaan
2. Kekurang-pedulian terhadap kesehatan akibat pola asuh yang salah, mengakibatkan kasus-kasus gizi buruk.
3. Kekeringan pada musim kemarau, terutama wilayah selatan, akibatkan gagal panen/puso
4. Masih sulitnya akses ke infrastruktur
5. Ketersediaan sarana produksi perikanan yang kurang memadai
6. Sebagian wilayah masih terisolasi
7. Ketersediaan infrastruktur pengairan yang masih terbatas lebih kecil 30%

#### **SASARAN YANG HARUS DICAPAI UNTUK MENGATASI PERMASALAHAN :**

1. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar terutama pendidikan, kesehatan dan prasarana dasar termasuk air minum dan sanitasi;
2. Berkurangnya beban pengeluaran masyarakat miskin terutama untuk pendidikan dan kesehatan, prasarana dasar khususnya air minum dan sanitasi, pelayanan KB dan kesejahteraan ibu, serta kecukupan pangan dan gizi;
3. Meningkatnya kualitas keluarga miskin; dan
4. Meningkatnya pendapatan dan kesempatan usaha kelompok masyarakat miskin, termasuk penerbitan sertifikat tanah rumah tangga miskin, meningkatnya akses

masyarakat miskin terhadap permodalan, bantuan teknis, dan berbagai sarana dan prasarana produksi.

Berikut adalah kebijakan-kebijakan yang diambil dalam rangka mendorong perubahan di Propinsi NTB tahun 2009 – 2013 :

### **KEBIJAKAN-KEBIJAKAN**

1. Mempercepat Pemenuhan Pelayanan Kebutuhan Dasar Masyarakat Miskin;
2. Mendorong Tumbuh dan Berkembangnya Lembaga Keuangan Mikro & Sarana Pendukung Perekonomian Sampai Tingkat Perdesaan;
3. Mendorong Tumbuh dan Berkembangnya Pusat-pusat Agrobisnis Dan Agro Industri;
4. Mendorong Tumbuh Berkembangnya Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh;
5. Mengupayakan Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis Bagi Masyarakat Miskin;
6. Mendekatkan Fasilitas dan Pelayanan Pendidikan Pada Daerah Terpencil dan Terbelakang Dan Mengupayakan Pelayanan Pendidikan Gratis Bagi Masyarakat Miskin .

### **Landasan**

1. UU Sistem Perencanaan Nasional No. 25 Tahun 2004
2. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala BAPPENAS dan Menteri Dalam Negeri No: 0259/M.PPM/I/2005 – 050/166/SJ Tanggal 20 Januari 2005, Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan MUSRENBANG Tahun 2005
3. Surat Gubernur Provinsi NTB Tentang Jadwal Pelaksanaan MUSRENBANG Tahun 2006.

Titik lemah Pemda, ketika menyakini perencanaan mulai dari desa, perangkat potensi desa, kemudian mengartikulasi potensi itu dalam mengatasi masalah yang ada di desa. Tetapi dengan melihat titik lemah kita, mulai di siklus tahunan yang ada dalam UU, kadang-kadang Pemda tidak konsisten, saat dokumen perencanaan dan RPJM sudah jadi, tapi saat penganggaran tidak konsisten. Praktek semacam ini yang sering terjadi dimana prosesnya mulai dari musyawarah level dusun, mestinya tugas pemerintah (terutama BPMPD maupun di Bappeda), sebagai aparat pemerintah membantu untuk menjamin masyarakat akan dapat dilihat dengan baik. Di bulan Januari mestinya bisa mengevaluasi program pada tahun sebelumnya. Kelemahan-kelemahannya apa, hambatan-hambatannya apa, dan apa masalah yang harus diselesaikan, namun biasanya sampai dengan bulan Januari data-data belum dapat, seharusnya pada satu hari sebelumnya (H – 1) nya, sudah ada pembahasan permasalahan-permasalahan apa yang ada di masyarakat, karena bulan Januari ini sudah harus dimulai RPJMDesa, dan Musresbang

desa, tetapi ketika di Musrembangdes, seringkali data-data pelaksanaan pembangunan itu tidak diikuti sesuai dengan yang ada dalam dokument RPJM.

Oleh karena itu untuk proses perencanaan, kebijakan pembangunan sekarang ini lebih difokuskan ke desa, ada desa mandiri pangan, desa pariwisata, desa siaga, desa PNPM, namun yang menjadi masalah adalah bagaimana semua itu dapat diintegrasikan menjadi kepentingan dan memenuhi kebutuhan desa. Hal ini merupakan tugas dari Pemerintah, baik BPMPD, Bappeda, atau siapapun.

Siapa yang bertanggung jawab memfasilitasi ini, kalau dulu ada isitilahnya karakterdes, di Kabupaten Lombok Tengah ada KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa), di kabupaten lain juga pasti ada. Di Kabupaten Lombok Tengah dapat dibuktikan, KPMD yang bekerja optimal, bisa meningkatkan perencanaan itu, atau kalau di Sumbawa Barat, disebut Bimantara kalau dibidang kesehatan, ini mestinya potensi-potensi seperti itu bisa lebih bangun sampai di level desa sehingga memberdayakan masyarakat desa dapat terwujud. Sehingga pembangunan tersebut tidak parsial, yang menjadi momen penting dalam hal ini agar bagaimana disetiap desa harus punya RPJMDes yang terpadu.

*... bagaimana pemda  
dapat memfasilitasi  
terwujudnya semua desa  
memiliki RPJMDes...*

Faktor penting yang lain adalah : ketika prioritas di desa belum tentu menjadi prioritas di kecamatan. Oleh karena itu harus ada satu pemilahan, untuk di level desa bisa menggunakan ADD atau dana PNPM, sedangkan di level kecamatan harus kecamatan yang mengurusinya, sehingga ada kesinambungan dari masalah yang berjenjang, tapi ini teori, ketika saya di Dinas Kesehatan, saya bisa membuktikan bahwa dengan perencanaan yang terpadu kita bisa lebih efisien dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada dilapangan. Misalnya di puskesmas, sudah ada dana operasional kesehatan, itu cukup fleksibel untuk bisa memfasilitasi pelayanan kesehatan yang ada di daerah masing-masing. Kalau kombinasi di tingkat Kecamatan bagus, pelayanan dasar dapat diatasi misalnya, orang sakit bisa menggunakan Jamkesmas. Ada peluang untuk bisa menggunakan dana BOK, namun harus ada koordinasi dalam pelaksanaannya.

Proses perencanaan pembangunan setelah dari forum SKPD, merupakan titik rawan dalam proses perencanaan daerah. Ketika permasalahan-permasalahan yang ada di kecamatan ditarik di SKPD , sehingga SKPD dapat mengunci berdasarkan kebijakan sehingga jika usulan dianggap “sesuai”, maka apa yang diusulkan itu dapat terakomodir, karena yang mengeksekusi program adalah SKPD. Oleh karena itu pada forum SKPD tersebut, bagaimana peran setiap SKPD untuk bertanggungjawab mereview kembali hasil dari kecamatan melalui musrembangda.

Hal yang lainnya juga tentang kebijakan donor, ini sangat penting, banyak sekali mitra di daerah mempunyai dana potensial, untuk bisa membantu menyelesaikan masalah-masalah yang ada di lapangan, misalnya ACCESS, GTZ, BVP. Banyak sekali donor-donor yang bergerak dengan mitra-mitra, tapi hal itu tidak bisa terpetakan, apabila itu memungkinkan maka penyelesaian masalah mulai dari desa hingga ke propinsi akan dapat dengan cepat terselesaikan.

## KESIMPULAN DARI HASIL PEMBAHASAN

- Perlu ada forum-forum teknis, untuk cross cek antara usulan dari Musrenbang dan dukungan teknis dari SKPD.
- Perlu adanya Optimalisasi koordinasi (sebagai introspeksi) antar para pihak yang berkompeten.
- Pemutahiran data, peta desa dimana BPMPD sebagai pihak yang berkompeten.
- Penguatan kelembagaan merupakan tanggungjawab BPMD, sementara BAPPEDA sebagai pihak yang mengawal dan mengartikulasikan hasil perencanaan dari bawah.
- Pentingnya data yang terpisah mulai dari level bawah dan didorong adanya pelibatan Perempuan melalui FGD-FGD.
- Penting adanya alokasi anggaran dari BPMD untuk memastikan keterlibatan perempuan.
- Indikator harus fokus untuk peningkatan akses orang miskin dan perempuan untuk meningkatkan kesejahteraan.
- Perencanaan akan mengakomodir dan mengkompromikan 4 “pendekatan” perencanaan antara lain : politis, teknokratis, partisipatif, bottom up, agar terjadi kolaborasi antar para pihak.
- Strategy penganggaran : 1. membangun komunikasi dengan DPRD, 2. koordinasi dan pendampingan di desa dan kecamatan untuk pengintegrasian masa reses anggota dewan, 3. efisiensi penggunaan anggaran
- Perlu ada sinkronisasi RPJM desa dan RPJM kabupaten.
- Perlu ada pengawalan (perencanaan-penganggaran) melalui forum delegator dengan memperhatikan pada titik-titik krusial di SKPD untuk memastikan hasil perencanaan dari bawah menjadi salah satu dasar untuk pengambilan keputusan.
- Perlu ada pemilihan dan pemilahan (skala prioritas) kegiatan untuk dapat di dorong pada level yang lebih atas dengan indikator atau standar yang jelas.
- Peran BPMD dan BAPPEDA berdasarkan pada fungsi bukan pada level.
- Memfungsikan peran kecamatan untuk penguatan fasilitator desa.
- Penting untuk memperkaya praktek-praktek baik (good practisis) sebagai sumber pembelajaran antar wilayah. Terutama untuk program-program pemberdayaan masyarakat.
- Penting untuk memikirkan bersama bagaimana orang-orang miskin benar-benar mendapatkan akses pembangunan dengan memperkuat data sebagai dasar intervensi dan pelayanan pembangunan.

## 2. Pembelajaran praktek-praktek dilapangan perencanaan partisipatif inclusive miskin dan perempuan (hasil dan dampaknya).

Sessi ini dipandu oleh Arief Mahmudi dan Nanik Munthohiyah dengan metoda Talk Show



Sebagai pengantar : *“Tadi kita sudah mendapatkan informasi dan berbagi pengalaman tentang dukungan dan integrasi regulasi dalam perencanaan di daerah, baik itu pengalaman di NTB maupun di luar NTB. Semangatnya luar biasa, banyak ruang atau kesempatan yang dapat diperoleh dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Inti dari proses partisipasi adalah apabila ada ruang dan kesempatan, ada payung hukum, dan ada komitmen dari pemda atau pihak lain, maka*

*hasilnya akan menjadi luar biasa”.*

Pada sesi ini, diberikan kesempatan kepada perwakilan dari Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) diantaranya yang pertama diberikan kepada Ibu Rukma dari Berugak desa Kabupaten Lombok Tengah, yang kedua adalah Bapak kepala desa Lantan yang akan bercerita tentang pengalaman dalam menyusun RPJMDesa dan mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan”, kemudian dilanjutkan oleh Ibu Gandhi dan yang terakhir adalah Bapak Marsamsumah. Berikut adalah hasil presentasi dari ke empat narasumber berdasarkan pengalamannya.

### 1) Ibu Rukma (Berugak Desa)

Uraian berikut merupakan cerita dari Ibu Rukmah. Berjalan sambil bernyanyi “Desaku yang ku cinta” selanjutnya memulai dengan bercerita. Kami adalah sekelompok fasilitator desa, pada tahun 2006 kami dipilih secara demokratis dari berbagai unsur baik perempuan, tokoh desa, atau masyarakat yang ada. Pada saat itu kami dipilih terkait dengan penyusunan perencanaan pembangunan. Terpilih 5 orang , 2 orang perempuan dan 3 orang laki-laki. Kami dilatih dari Mitra Samya, bagaimana menyusun Perencanaan melalui pendekatan CLAPP. Setelah



sekitar setahun berjalan, akhirnya dari sekelompok orang desa tersebut, kami berhimpun dalam lembaga yang namanya Berugak Desa (Beriuk Gagas Kesejahteraan Masyarakat Desa), yang beranggotakan 14 orang. Penggagasnya adalah pak Amin, pak Bagus, dan pak Khalik (Kepala Puskesmas Kopang). Bukan saja sebagai mitra di tingkat desa, alhamdulillah sekarang merupakan mitra strategis dengan Pemerintah Kabupaten.

Dan ternyata pelayanan yang diberikan belum maksimal (kurang) khususnya untuk masyarakat miskin. Biasanya kalau ke rumah sakit atau ke puskesmas, dipandang sebelah mata oleh para pemberi layanan. Kurang senyum dan agak sinis, tapi alhamdulillah kita survey dan menyampaikan permasalahan ditingkat masyarakat, hasilnya luar biasa, yang awalnya puskesmas itu lingkungannya kurang bersih dan pelayanan yang kurang bagus, akhir tahun 2008 Puskesmas Kopang mendapat juara 1 untuk PHDS.

*Kami juga banyak membangun jaringan dengan para pihak, th 2007, tahap awal Bangdes, terkait saat itu ada lomba desa model, bagaimana pelayanan public ditingkat kesehatan, bagaimana sih pelayanan yang diberikan oleh kesehatan kita, di desa Kopang Rembiga, terkait hal itu kami melakukan survei di puskesmas dan rumah sakit.*

**Terbangunnya partisipasi**, bagaimana membangun partisipasi terkaitnya dengan adanya program, yang akan diberikan pemerintah, dan mendorong bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi saat itu. Kaitannya rumah kumuh misalnya, kami sebagai pelaksana, ada dana bantuan untuk 10 unit rumah yang tidak layak huni, bagaimana membangun partisipasi masyarakat agar mereka punya kontribusi, misalnya 1 rumah 5 juta, tidak kami diberikan langsung dananya, tapi bagaimana mereka punya kontribusi sehingga niat bangun 10 rumah dikembangkan menjadi 13 rumah.

**Fungsi control pelayanan publik:** mendorong masyarakat memberi layanan dengan baik, dan melakukan fungsi kontrol.

**Membangun kolaborasi** : biasanya PNPM itu kesulitan bagaimana mendekati lembaga-lembaga, dan bagaimana masyarakat berkolaborasi dengan PNPM. Faktor pendekatan yang Berugak desa lakukan, sehingga kemudahan itu ada, misalnya dari PNPM bagaimana 25 orang bulan Juli ini menjadi fasilitator desa yang handal. Di PNPM lebih dikatakan relawan, yang akan dilatih bagaimana dalam penyusunan RPJM, betul-betul mandiri. Saat ini kita sedang melakukan review RPJMDes, kami bergerak untuk 5 desa (kerjasama dengan ACCESS), karena permintaan, jadi semua desa di kopang ada 9 desa, 4 desa tidak ingin dianak tirikan,

**Terbangunnya komitmen dalam proses perencanaan**, artinya sebelum ke musrenbang, mengundang pihak desa untuk membangun komitmen mereka ketika nanti ada program, apakah sama program yang ada di kabupaten dengan yang di desa, supaya tidak sia-sia apa yang diusulkan masyarakat ketika mengikuti musrenbang.

**Harapan kedepan**, bagaimana 1 RPJMDes untuk semua program yang ada, jadi apapun program yang masuk desa akan mengacu pada RPJMDes. Tidak lagi program masuk desa seperti PNPM, Labsite dsb yang tidak terintegrasi dengan RPJMDes.

**Inti pembelajarannya :**

1. Organisasi Rakyat "Berugak Desa" mampu mengintegrasikan kebutuhan masyarakat dalam satu perencanaan, karena adanya komitmen yang kuat dari aparat desa dan masyarakat desa Kopang Rembiga.
2. Agar RPJMDes dapat diakomodir oleh Pemda dan dapat dipergunakan oleh pihak lain, maka Strategi pengawalan dan promosi hasil RPJMDesnya dilakukan oleh semua pihak, baik oleh Aparat Pemerintah desa maupun oleh pihak lain.

## 2) Pak Mahrudin (Kepala Desa Lantan) :



Waktu kecil pernah bermimpi bagaimana desa saya kedepan lebih maju. Dulu saya tidak peduli, namun pada saat itu saya tergugah dan penasaran kenapa masyarakat sering ngumpul. Desa Lantan itu adalah desa yang termarginalkan, terisolir, listrik tidak ada, air bersih tidak ada, pendidikan SD ada 3 tapi kondisinya parah, seperti itu, untungnya saya bisa tamat.

Waktu tahun 2004, saya ikut musyawarah, dan saya terpilih menjadi tim pelaksana desa. Yang saya bingungkan apa sih pekerjaan saya nanti, sementara setiap forum-forum pertemuan, masyarakat selalu bertanya misalnya ada tidak uangnya, yang diharapkan dana untuk modal usahanya.

Waktu itu tim pelaksanaan desa mencoba terus membina, berdiskusi dengan mereka, dan segala prioritas ditentukan tiga dusun yang menjadi masyarakat perempuan di pinggir hutan. Tahun 2004 masuk program ACCESS, tahun 2005 mencoba menggambarkan impian masyarakat. Di tahun 2004, kami membuat Renstra/RPJMDes. Renstra desa 2004 itu, ternyata di tingkat Kabupaten Lombok Tengah menjadi acuan, seluruh desa harus mempunyai Renstra Desa. Renstra desa itu menjadi senjata ampuh untuk mendobrak kebijakan-kebijakan, untuk mendapatkan dana-dana pusat maupun Kabupaten. Kalau masalah ADD, itu sebetulnya sudah biasa. Dari tahun 2007 mengawal Renstra, yang sekarang RPJMDES supaya tidak tumpah tindih. Tahun 2008 ikut desa mandiri energy sehingga sekarang desa Lantan sudah terang benderang dimana 900 orang merasakan manfaat dari listrik. Sebagai tindak lanjut dari program yang sudah tertuang di RPJMDesa ternyata akan dijadikan pencontohan desa oleh pemerintah pusat, sebenarnya saya merasa berat karena memikul beban ini.

*Pemekaran desa Lantan pemekarannya tahun 1996 definitif tahun 1997 (masih kelas 3 Tsanawiyah). Kepala desa di Lantang 10 tahun dipegang oleh orang luar (mantan Kepala desa Lalu subhan), hampir 10 tahun hasilnya nol. Kondisi saat ini berkat dukungan mayarakat desa Lantan dan dukungan lembaga LSM (ACCESS, Mitra Samya) mau peduli desa ini.*

Yang menjadi daya tarik saya adalah keterlibatan perempuan, dalam menentukan kebijakan dalam pengambilan keputusan untuk pembangunan. Perempuan butuh air, akhirnya bagaimana caranya saya ajak masyarakat mengambil air pakai bambu. Tahun 2009 kemarin masuk program UNICEF 1600 KK semua dipasangkan house connection, PDAM desa. Itu dampak positif yang bisa kita dapat dari Renstra atau RPJMDes. Dari tim pelaksana, sampai terpilihnya saya menjadi kepala desa.

Sekarang berlanjut ke Lombok Barat, kita mempunyai 2 orang narasumber, pertama ibu Gandu nama keren asli dari ibu Kustiah seorang penjual nasi kaki lima, mencoba berbagi resep bagaimana dari keterbatasan bisa mempengaruhi orang lain, bagaimana cara dan perubahan yang akan didapat. Dan yang lain adalah bapak kita namanya Marsamsamah. Beliau akan bercerita tentang perjuangan masyarakat Kuripan Selatan untuk memperjuangkan Hasil RPJMDes. Menurut beliau Bicara RPJM tidak akan merubah apa-apa jika tidak ada perjuangan dan Pemasaran.

**Inti pembelajarannya :**

Apabila Renstra dibuat oleh masyarakat dan itu benar-benar mengakomodir kebutuhan masyarakat, maka masyarakat akan berjuang, berkomitmen untuk mewujudkan renstra, bukan sebagai dokumen meminta-minta tapi sebagai dokumen mewujudkan cita-cita.

Berikut hasil ceritanya :

3) **Ibu Gandu :**

Ceria dari Ibu Gandu ini akan di ekspresikan dalam bentuk puisi. Demikian penuturan dari Ibu Gandu “saya tidak bisa bicara atau presentasi seperti yang lain, namun saya akan bercerita melalui puisi”.

## **PERJALANAN PEREMPUAN**

*Perjalanan perempuan, mencapai mimpi di komunitasnya,  
kehidupan membawanya kemana,  
karena dia tidak ada pendidikan, tidak ada pengalaman,  
dia hanya tau sumur kasur dan dapur.  
Dengan melihat disamping kanan kirinya yang kehidupannya sama dengan dirinya,  
miskin pengetahuan, dan buruknya kesehatan.  
Akhirnya dia bangkit,  
dia berpikir, bagaimana memperjuangkan hak yang mungkin, hak mereka,  
Dia mengikuti diskusi-diskusi di segala forum dan lembaga yang ada di desanya. Akhirnya  
dia terpilih menjadi wakil memperjuangkan hak perempuan miskin. Perempuan itu  
membawa kemenangan,  
terbukalah hati mereka pemegang kekuasaan.  
Bahwa perempuan mampu dipercaya, mampu bertanggung jawab,  
mampu melakukan, dengan kepercayaan, aku terpilih menjadi komunitasku, bersama  
teman kami membantu kaum miskin, meraih akses haknya,  
baik pelayanan public, maupun kesehatan reproduksi, tantangan kami lalui,  
kami berjuang dengan ketulusan hati,  
kami berusaha menerobos masuk kesemua program yang ada didesa kami,  
hingga kami terpecah masuk dalam perencanaan desa,  
Musrembang kami ikuti, masuklah program-program yang lain,  
komunitas kami yang ikut terjun didalamnya,  
hingga kami tak percaya memasuki Musrembang desa dan RPJM desa.  
Langkah kami tidak berhenti disini,  
untuk meraih kehidupan yang setara,  
kami menunggumu,  
hai akhirnya kau menyentuhkan.  
Komunitasku Mandiri Kekeri.*

#### 4) Pak Marsamsumah :

Saya datang dari TANI (Tiang Agung Negara Indonesia), kami menceritakan tentang keberhasilan RPJM selama tahun 2006 sampai 2011. Presentasi saya menggunakan metoda Konsep dagang obat, jangan katakan saya kurang ajar, karena kita sama-sama belajar, Berdiri sama tinggi duduk sama saja.



RPJMDes yang kami bentuk menjadi dalang kami. Terbukti usaha meningkat, usaha kacang panjang, potensi lahan kering, sumber air sudah ada. Kami laksanakan dilapangan belum dapat honor. Pengalaman kami dibidang ekonomi, sudah bisa membentuk kelompok-kelompok miskin, artinya supaya mereka menjadi kaya. Miskin dulu baru kaya. Jika kredit 1 juta saya sarankan ke BRI ada KUR.

RPJM ini tidak bisa jalan. Untuk musyawarah setiap awal bulan s.d. akhir bulan. Kami bisa serap langsung. Kalau kita bicara kemiskinan, memberikan masukan dan saran. Saya coba di satu RT. KK-nya 25%, mensekolahkan anak, punya sepeda motor, membuka usaha tempe. Kami dapat program mandiri pangan, bantuan PAD, Agropolitan untuk di desa Kuripan disebabkan karena RPJM hamper mau final. Keberhasilan akan berhasil kalau kita tahan uji. Kami juga menggunakan loudspeaker masjid untuk mengumumkan beberapa hal, termasuk penagihan tunggaka pinjaman. Wass.

Jika RPJM tidak dikawal ketat, maka

*Sejak tahun 2006, kami melaksanakan upaya hingga tersusunnya RPJMDes. Sejak saat itu sampai sekarang, usulan desa selalu mendapat perhatian misalnya perbaikan Kantor desa, Pengaspalan desa dsb. Karena seringnya kami memperjuangkan RPJMDes, sampai-sampai saya diuluki banak proposal.*

#### **Inti Pembelajarannya :**

1. Keberhasilan mendorong inisiatif dan partisipasi warga, adalah memastikan bahwa arah pembangunan desa harus dipahami dan disepakati oleh warga itu sendiri.
2. RPJMDes itu harus benar-benar diperjuangkan dan diwujudkan, bukan hanya dokumen yang disusun dan menunggu dukungan dari pihak lain.
3. Proses pengawalan hasil RPJMDes harus dilakukan secara konsisten mulai dari desa sendiri hingga kabupaten, bahkan sampai ke Propinsi.

### 3. Meningkatkan alokasi anggaran Pemda untuk pembangunan melalui proses perencanaan yang partisipatif, inclusive miskin dan perempuan.

Sessi ini dipandu oleh I Gusti Bagus Aryawa :



Kemudian dari teman-teman OMS, yang dari desa mencoba menceritakan kesuksesannya, terutama penyusunan RPJMDes jika dihubungkan dengan anggaran, dari mana saja sumbernya dan bagaimana cara memperjuangkannya.

#### 1. Zaenal Arifin (Bappeda Sumba Timur) :



Pada sesi ini Pak Arifin Staff Bappeda dari Sumba Timur mencoba untuk bercerita tentang perjuangannya bersama dengan OMS Lokal untuk meningkatkan penganggaran desa untuk dijadikan dasar oleh SKPD dalam upaya mengakomodir kebutuhan desa yang akan dimasukkan dalam perencanaan penganggaran.

Kondisi perencanaan pembangunan saat itu di Sumba Timur :

- Semua desa dan kelurahan di Sumba Timur (140 Desa dan 16 Kelurahan) belum memiliki dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah-Desa/Kelurahan (RPJM-Desa/Kelurahan).  
Pemanfaatan RPJM desa sebagai basis perencanaan pembangunan di Sumba Timur adalah salah satu upaya untuk mendorong percepatan pembangunan di desa hingga kabupaten. Dan akan ideal sekali apabila masyarakat yang merencanakan sementara Pemda yang memenuhinya.
- Proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah-Desa (RKP-Desa) masih bersifat elitis, formalistik, partisipasi masyarakat (terutama perempuan, orang miskin, kaum marginal masih sangat minim)
- Isi/substansi RKP-Desa: lebih banyak daftar keinginan dari pada kebutuhan, lebih banyak untuk pembangunan fisik daripada penguatan kapasitas SDM, swadaya masyarakat kurang

- Proses Musrenbang-desa tidak ada persiapan masyarakat, musrenbang-dusun jarang dilakukan, Musrenbang-Desa hanya dihadiri oleh utusan-utusan tertentu saja, tidak melibatkan masyarakat secara keseluruhan.

RKPDesa disusun tidak berdasarkan pada RPJMDesa, padahal RPJMDesa merupakan rujukan dan induk program bagi RKPDesa. Ada ACCESS, memperkenalkan sebagai perwujudan prinsip-prinsip perencanaan dan penganggaran desa.

## **Kerangka hukum :**

### **Payung Hukum Makro**

- UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan daerah – kerangka dasar otonomi daerah – mengamanatkan perencanaan pembangunan dari bawah secara partisipatif
- UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional: pendekatan politik, pendekatan teknokratis, pendekatan partisipatif, pendekatan Atas-Bawah (Top-Down) Pendekatan Bawah-Atas (Bottom-Up)

### **Payung Hukum Spesifik**

- PP No. 72/2005 tentang Desa – penjabaran lebih lanjut UU No. 32/2004 (pasal 216)– posisi desa dalam konteks otonomi daerah – (Pasal 63-66)
- Permendagri No.66/2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa
- Permendagri No. 37/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

**Prinsip perencanaan (pasal 5 ayat 2, Permendagri 66/2007 dan anggaran pasal 2 Permendagri 37/2007) :**

- Pemberdayaan: kemampuan dan kemandirian
- Partisipatif: keikutsertaan, keterlibatan, aspirasi, rasa memiliki
- Berpihak pada masyarakat: kesempatan bagi orang miskin, perempuan
- Terbuka: proses dapat dilihat dan diketahui secara langsung
- Akuntabel: proses dan tahapan dapat dipertanggung jawabkan
- Selektif: semua masalah terseleksi untuk hasil yang optimal
- Efisiensi dan efektif : pelaksanaan kegiatan sesuai dengan potensi SDA dan SDM
- Keberlanjutan: setiap proses dan tahapan berkelanjutan
- Cermat data : obyektif, teliti, dapat dipercaya, menampung aspirasi masyarakat
- Proses berulang : kajian suatu hal berulang untuk menjamin hasil yang baik
- Penggalan informasi: melalui alat kajian keadaan desa
- Prinsip pengelolaan keuangan desa: transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin

**Kalau bisa, kenapa tidak dicoba.**

- Tahun 2006 ada 2 desa ( Desa Kamanggi, Matawai katingga) yang difasilitasi oleh ACCESS-Mitra Samya-LSM Lokal menyusun RPJM-Desa
- Tahun 2007: ada 9 desa dan 2 kelurahan, difasilitasi menyusun RPJM-Desa/Kelurahan
- Total: ada 11 desa/2 kelurahan yang sudah memiliki dokumen perencanaan pembangunan

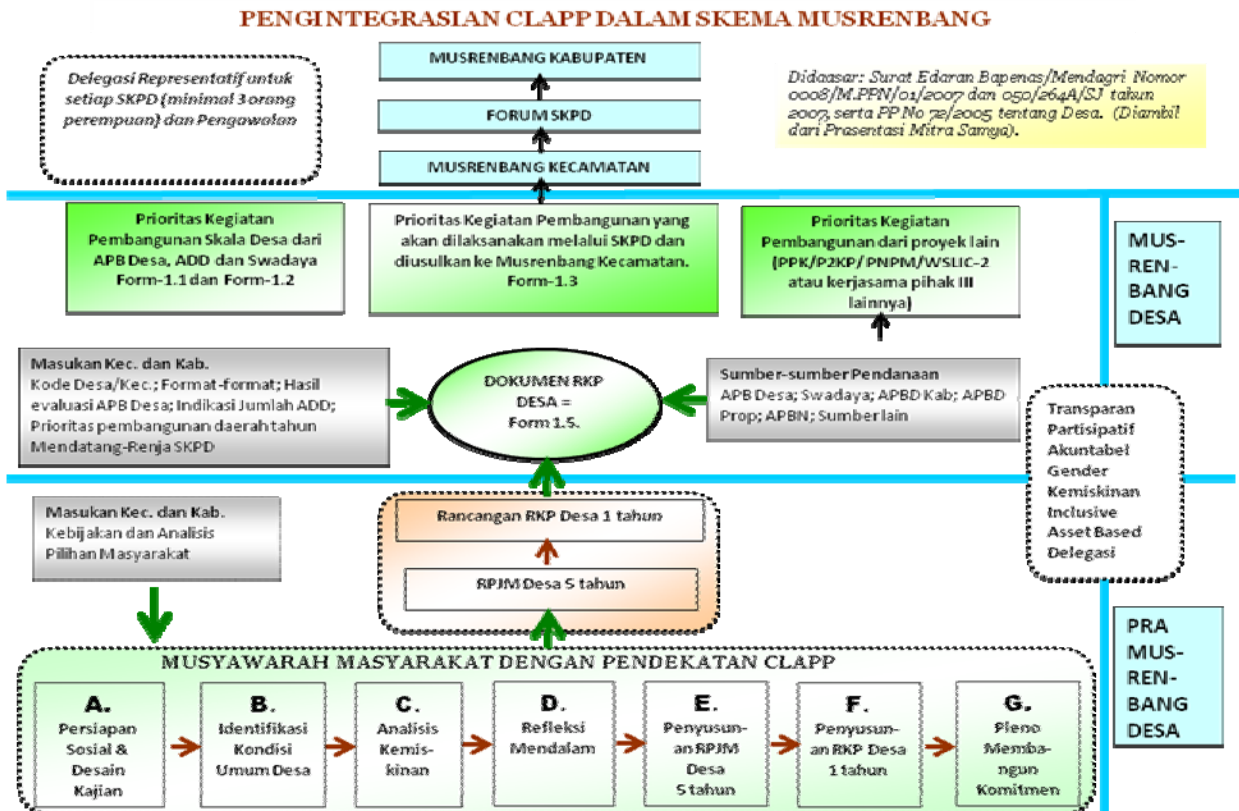


**Keterangan :**

**Antusias para peserta untuk melihat buku- buku dan dokumen yang dipamerkan oleh panitia.**

- Selanjutnya **Yulius Opan dan Agustina** (OMS dan masyarakat desa Kahangueti melanjutkan presentasi dari Tim Sumba tentang skema perencanaan di masing-masing desa:

### Skema



**Catatan penting dari keberhasilan proses penyusunan dan perwujudan hasil RPJMDes adalah sebagai berikut :**

- Perlu adanya seorang fasilitator dalam memandu penyusunan RPJMDes yang berasal dari desa setempat
- Masyarakat dari segala unsur harus dilibatkan baik dari kalangan orang miskin, perempuan atau kelompok marginal dan memang benar-benar kebutuhan mereka dapat diakomodir dalam RPJMDes yang telah disusun.
- Perlu ada komitmen dari masyarakat untuk terus memperjuangkan dan komitmen dari Pemda untuk mengakomodir dan mendukung.
- Adanya komitmen yang kuat dari pejabat atau kepala pemerintahan yang memang memiliki perhatian kebutuhan masyarakat desa.

Selanjutnya fasilitator mengajak belajar bersama dengan melalui media video **“Suara Warga Suara Pembangunan”** yang merupakan film documenter untuk promosi Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran yang berbasis Masyarakat melalui pendekatan CLAPP.

## Hari ke dua, 30 JUNI 2010

Fasilitator : I Nyoman Oka

Pendamping : Nanik, Arief, Toha, Bagus.

Metoda : Brainstorming, Delphi, diskusi kelompok.

---

### PENJELASAN ALUR KEGIATAN HARI II,

JAM	MATERI
08.00 - 08.30	Overview pembelajaran hari pertama
08.30 - 10.00	Belajar ke Jeneponto “Strategi membangun & mewujudkan Komitment & Peragaan hasil peta social.
10.15 - 11.30	Diskusi Kelompok “Membedah manfaat, merajut perencanaan, membangkitkan desa menuju partisipasi inclusive orang miskin & perempuan, asset based, apresiatif, transparan dan akuntable”
11.30 - 12.00	Pleno – DELPHI
12.00 – 12.30	Membangun komitmen bersama – BPMPD
12.30 - 13.00	Evaluasi dan Penutupan

### ICE BREAKER

Simulasi : Mencari pasangan – bahasa jepang dan bahasa Indonesia

1. Setiap peserta mengambil sendiri potongan kertas kecil yang bertuliskan Bahasa Indonesia atau “bahasa jepang” antara lain seperti contoh dibawah ini :  
Ditangkap polisi → Ka zhi doku aza ne  
Orang edan → ora na ta warase  
Laper (sedikit) → Ka zhi kue aza  
Laper banget → Sikate abizh deh  
Baru gajian → Doku na ba nyake.....dan sebagainya
2. Setelah semua peserta mendapatkan potongan kertas kecil tersebut kemudian mencari pasangan yang sesuai dengan artinya (yang mendapatkan kalimat bahasa Indonesia mencari peserta yang mempunyai kesesuaian arti dalam “bahasa Jepang”).
3. Masing-masing pasangan kemudian membacakan dengan keras-keras secara bergiliran teks pasangan kalimat yang mereka dapatkan. Pembacaan didahului dengan teks bahasa Indonesia kemudian “bahasa Jepang”.

*Catatan* : Ice breaker ini mampu mencairkan suasana serta meningkatkan keakraban dan kebersamaan antar peserta. Tidak jarang ada pasangan yang tidak cocok artinya, namun dipaksa untuk dicocok-cocokkan, ketidakcocokan ini justru memberikan suasana yang lebih lucu dan segar.

#### **4. DISKUSI KELOMPOK I (Review pembelajaran Hari I)**

##### **HASIL DISKUSI KELOMPOK TAHAP I (REVIEW PEMBELAJARAN HARI PERTAMA)**

###### **Kelompok 1 : Gambarkan suasana/situasi proses dan hasil hari I.**

Inti penjelasan gambar yang dibuat :

1. Suasana cair penuh semangat dan antusias untuk membuat yang terbaik
2. Banyak pembelajaran yang bisa dipetik
3. Setara melahirkan komunikasi yang baik antara OMS dan Pemda
4. Koordinasi dan komitmen dari semua pihak sangat penting dalam mendorong perubahan di kabupaten



###### **Kelompok 2 : Pembelajaran utama yang diperoleh hari I**

###### **Kesimpulan :**

1. Perencanaan dan penganggaran yang mengakomodir kebutuhan masyarakat maka akan melahirkan pembangunan yang memang dapat dinikmati oleh masyarakat itu sendiri.
2. Koordinasi, relasi dan sharing pengetahuan dan pengalaman antar stakeholder sangat penting dalam pelaksanaan perencanaan

###### **Kelompok 3 : Tema-tema luar biasa yang dibahas dan ditangkap pada hari pertama dalam konteks perencanaan dan penganggaran.**

###### **Kesimpulan :**

1. Pentingnya pengintegrasian perencanaan pembangunan desa yang partisipatif
2. Dengan pengawalan hasil perencanaan maka penganggaran meningkat dan kewenangan desa meningkat.

###### **Kelompok 4 : Lingkungan dan factor yang mendukung proses belajar kemarin**

###### **Kesimpulan :**

1. Sarana dan prasarana pembelajaran yang sangat mendukung.
2. Proses fasilitasi dapat membangun suasana belajar bersama antar para pihak.

3. Partisipasi aktif peserta dan sharing antar peserta (mengetahui perkembangan daerah lain dan kebijakan) berjalan cukup antusias.
4. Materi yang disajikan sangat sesuai (substansi dan metode).



**Kelompok 5 : Perasaan (Individu) hingga saat ini :**

**Kesimpulan :**

1. Senang, happy, puas, antusias, bangga, ceria dan semangat karena bertambahnya wawasan dan referensi
2. Bahagia karena kekeluargaan serta bertambahnya kenalan
3. Sedih, penasaran karena akan berpisah dan pembahasan RPJM yang kurang tajam serta kemungkinan akan menjadi actor
4. Pertemuan koordinasi yang dirancang dengan pendekatan dan metode seperti ini akan sangat bermanfaat dan proses menjadi baik, peserta menjadi lebih terbuka serta hasil menjadi lebih produktif

**5. Belajar dari Jeneponto “Strategi membangun & mewujudkan komitmen para pihak & Peragaan hasil peta social.**

**Narasumber Bapak Rahmat (Yayasan Mitra Turatea – Sulawesi Selatan)**

Judul :

**PENGALAMAN TENTANG STRATEGI MEMBANGUN DAN MEWUJUDKAN KOMITMEN PARA PIHAK DALAM MEWUJUDKAN PERENCANAAN DI DAERAH PENAYANGAN DAN PERAGAAN HASIL PETA SOCIAL.**

Catatan penting hasil presentasi :

1. Tantangan untuk NTB untuk melakukan pemetaan yang lebih baik
2. Kearifan yang dipakai dalam pemetaan.
3. Alokasi dana/desa yang perlu didorong

4. Peluang support asistensi teknis oleh pihak lain (OMS dan Pemda)
5. Realisasi kegiatan dari RPJM desa menuju kebutuhan yang strategis
6. Peta sebagai alat komunikasi yang dapat diadopsi

## **6. DISKUSI KELOMPOK TAHAP II**

**Tema Diskusi :**

**“MEMBEDAH MANFAAT, MERAJUT PERENCANAAN, MEMBANGKITKAN DESA MENUJU PARTISIPASI INCLUSIVE ORANG MISKIN DAN PEREMPUAN, ASSET BASED, APRESIATIF, TRANSPARAN DAN AKUNTABLE”**

Kelompok dibagi menjadi 4 antara lain :

1. Kelompok Pemerintah Propinsi
2. Kelompok Pemerintah Kabupaten
3. Kelompok OMS
4. Kelompok Masyarakat

### **Kesimpulan :**

1. Penyusunan RPJM sangat penting sebagai landasan pembangunan di daerah
2. Dalam proses Musrenbang dan menyusun RPJM harus melibatkan kebutuhan masyarakat miskin, perempuan, pemuda dan kaum marginal
3. Diperlukan Komitmen yang kuat dari semua pihak terutama Pemda atau SKPD dalam mengakomodir usulan yang tertuang dalam RPJMDes ke dalam usulan RPJM Kabupaten
4. Perencanaan yang diusulkan oleh masyarakat akan dapat terwujud apabila ada dukungan yang kuat dari Pemda dan Kepala Daerah
5. Peran Pendamping dalam proses Musrenbang dan penyusunan RPJM sangat penting untuk menjamin kualitas hasil
6. Proses pengawalan mulai dari Musrenbangdes hingga Musrenbangda perlu dilakukan secara intensif oleh masyarakat sendiri
7. Dalam menyusun perencanaan perlu mempertimbangkan kekuatan dan potensi local yang dimiliki

## 7. MEMBANGUN KOMITMEN

(Dipandu oleh kepala BPMPD Provinsi Nusa Tenggara Barat).

### Proses :

Kepala BPMPD meminta peserta untuk menyampaikan ide dan gagasan dalam rangka membangun komitmen dalam untuk mewujudkan perencanaan pembangunan desa yang inclusive orang miskin, perempuan dan kelompok marginal lainnya berdasar asset, penghargaan atas segala upaya, transparan dan akuntabel. Berikut adalah 7 butir komitmen yang telah di deklarasikan dalam forum pertemuan tersebut yang dibangun atas dasar kesepakatan bersama antara BPMD, Bappeda se propinsi NTB bersama warga dan Organisasi masyarakat sipil yang hadir dalam pertemuan koordinasi tersebut.

### 7 butir komitmen Bersama

*Dalam rangka mensukseskan pembangunan yang inclusive kelompok miskin, perempuan dan kelompok marginal lainnya, disepakati bersama bahwa semua pihak akan:*

1. Melakukan **pendekatan dengan Bupati** secara formal maupun informal dalam rangka mewujudkan perencanaan dan penganggaran tingkat desa secara partisipatif.
2. Mengembangkan **kerangka hukum/regulasi** tingkat Kabupaten (misalnya Surat Edaran Bupati, Perbup atau Perda) untuk mendukung perencanaan dan penganggaran partisipatif.
3. Melakukan **pengawasan** pengelolaan pembangunan secara bersama-sama (stakeholders) atas perencanaan dan penganggaran yang sudah tersusun dan sedang berjalan (sejak perencanaan tingkat desa sampai penyusunan APBD).
4. Menjadikan RPJMDes yang **disusun dari bawah** sebagai dasar penyusunan kegiatan pembangunan.
5. **Mengalokasikan ADD** sesuai UU 32/2004 pasal 212, PP 72 pasal 68 (sesuai peraturan dan perundangan yang sudah ada).
6. Mengembangkan **system pendataan (baseline) kemiskinan di setiap desa/kelurahan by name by address, mudah diakses dan digunakan** dalam pembangunan.
7. Memfasilitasi **proses penyusunan RPJMDes untuk semua desa di Kabupaten dengan pengalokasian anggaran yang jelas** tergantung sumber-sumbernya.

## 8. EVALUASI

### HASIL EVALUASI

1. Tingkat kepuasan peserta terhadap kegiatan sharing pembelajaran adalah :

Penilaian/evaluasi	Perempuan	Laki-laki	Jumlah
Sangat memuaskan	3	7	10
Memuaskan	12	18	30
Kurang memuaskan	0	0	0
Tidak memuaskan	0	0	0

2. Tingkat keaktifan peserta dalam proses kegiatan

Penilaian/evaluasi	Perempuan	Laki-laki	Jumlah
Sangat aktif	1	1	2
Aktif	12	25	27
Kurang aktif	0	0	0
Tidak aktif	0	0	0

**Catatan :**

Ternyata tidak semua peserta menempelkan kertas pada stickycloth yang telah disediakan, hal ini terlihat dari jumlah peserta yang hadir hanya sekitar 60-70% yang menempelkan kertasnya.

## 9. PENUTUPAN



### Proses :

1. Pemberian cidera mata berupa pengalungan kain tenun khas sasak dari tokoh adat sasak Bapak Raden Muhammad Rois kepada utusan peserta dari luar daerah yakni Agustina dari Sumba Timur, dan bapak Rahmat dari yayasan Turatea Sulsel, sekaligus pengucapan wejangan adat.
2. Pemberian plakat oleh Kepala BPMPD Propinsi NTB untuk narasumber dari luar daerah yakni bapak Sulaeman – Bappeda Jeneponto Sulsel, bapak Arifin – Bappeda Sumba Timur, dan bapak Rahmat – Yayasan Turatea Sulsel.
3. Sekapur sirih oleh bapak kepala BPMPD Propinsi NTB pada acara penutupan. Pada intinya kepala BPMPD mengucapkan terima kasih khususnya kepada ACCESS serta mitra kerja lain atas kerjasamanya dalam kegiatan ini, sehingga dapat mewarnai dan memperkaya pertemuan, dan berharap kegiatan seperti ini bisa berlanjut. Selanjutnya Pertemuan Koordinasi dan Berbagi Pembelajaran ini ditutup secara resmi dan diakhiri dengan doa bersama.

## GALERI FOTO KEGIATAN

PERTEMUAN KOORDINASI DAN BERBAGI PEMBELAJARAN PROGRAM ACCESS  
DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
Mataram, 29-30 Juni 2010



Peserta kegiatan Berbagi Pembelajaran Program ACCESS sedang melakukan registrasi Kiri (Bapak Johan Arifin-Kabid Ekonomi Bappeda Lobar) Kanan (Bapak Raden Rais dari AMAN )



- laporan panitia penyelenggara disampaikan oleh Drs. I Putu Wedadi.
- Sambutan Korprov ACCESS Provinsi NTB-Lombok disampaikan oleh Dian Anggraeni.
- Pengarahan Kepala BPMPD Provinsi NTB, sekaligus membuka secara resmi.



Menyanyikan Lagu Indonesia Raya, dalam rangkaian acara pembukaan



- Pak Oka (Fasilitator) sedang memaparkan alur proses kegiatan
- Moderator (Toha Arifin-ACCESS) sedang menghantarkan para nara sumber



Para Nara Sumber Sedang Berbagi Pengetahuan dan Pembelajaran :

1. Bapak Sudaryanto, kepala BPMPD Prov.NTB.
2. Bapak Lalu M. Amin, Assisten 2 Pemda Loteng
3. Bapak Suleman, Bappeda Kabupaten Jeneponto.
4. Bapak M. Wahyudi, Bappeda Provinsi NTB



Proses dialog dan tanya jawab : Bapak Amrul Hadi- Kepala Desa Tanak Beak, Samsidar-LENSA Dompu dan M. Jafar, Bapeda Kab. Bima



Nanik (ACCESS-Lombok) dan Arif (ACCESS-Sumbawa) sedang memfasilitasi Sharing pengalaman membanggakan dari Berugak Desa-Kopang Rembiga dalam : "Perjalanan panjang Berugak Desa sbg mitra strategis pembangunan di Loteng"



Berbagi pengalaman dan pembelajaran membanggakan dari para pelaku (aktor) pembangunan di masyarakat :

- Kepala Desa Lantan-Loteng (Nahrudin) tentang proses penyusunan dan pengawalan RPJM Desa sebagai acuan pembangunan desa.
- Ibu Kustiah (Ibu Gandu) Community Complain Centre-Kekeri, tentang kunci sukses mengorganisir perempuan bermodalkan kepedulian dan keterbatasan.
- Marsyamsamah Fasilitator Desa Kuripan Selatan-Lobar, strategi memasarkan RPJM Desa sebagai sumber acuan pembangunan desa.



- Salah seorang peserta sedang menyampaikan kesan untuk didokumentasikan
- Peserta sedang melihat pameran yang digelar selama kegiatan berlangsung.



Nara Sumber dari Propinsi Lain :

3. Zaenal Arifin (Bapeda Sumba Timur),
4. Agustina-Fasilitator dari Desa Kamanggi, Matawai katingga-Sumba Timur.
5. Yulius Opan-LSM Mitra ACCESS di Sumba Timur
6. LSM-Mitra Turatea -Strategi membangun dan mewujudkan komitmen parapihak dan praktek di lapangan dalam mendorong proses perencanaan pembangunan desa secara partisipatif.





Suasana dan kondisi peserta selama proses kegiatan berlangsung



Wakil masing-masing kelompok ( Pemprop, LSM dan Pemda) sedang mempresentasi hasil diskusi kelompok



Penutupan acara sekaligus penyerahan plakat dan cendra mata kepada nara sumber dari prop Sumba Timur dan Sulawesi Selatan